LAPORAN KINERJA

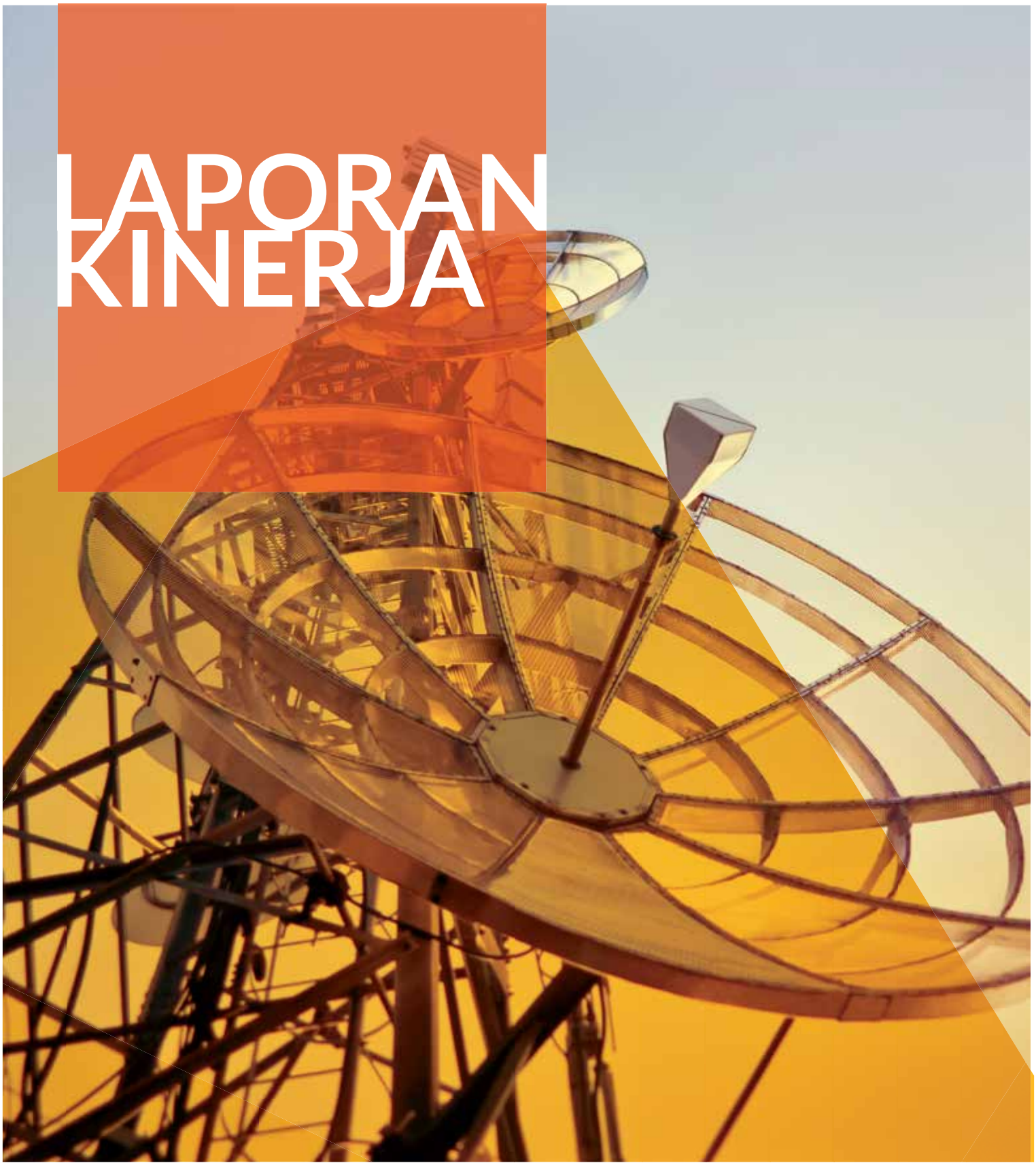

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2014

KEMKOMINFO

Laporan Kinerja

Kementerian Komunikasi dan Informatika

KEMKOMINFO

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan ke dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis itu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010—2014, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2010—2014, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014.
Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010—2014 telah dijabarkan visi jangka menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni "Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI." Visi dimaksud telah dituangkan "ke dalam misi, tujuan dan sasaran yang telah dicapai pada tahun 2014. Dalam mencapai visi dan misi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan 18 (delapan belas) sasaran strategis yang dicapai dalam tahun 2010—2014. Pencapaian tahun 2014 delapan belas sasaran strategis baik dalam perspektif pemangku kepentingan, perspektif layanan, ataupun perspektif proses internal dijelaskan sebagai berikut.

Perspektif pemangku kepentingan ialah:

1. meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di semua wilayah Indonesia, persentase capaiannya sebesar 82%;
2. tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke semua pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI, persentase capaiannya 98%;
3. terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal, persentase capaiannya sebesar 103%;
4. mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, persentase capaiannya sebesar 120%;
5. mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, persentase capaiannya sebesar 100%;
6. mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional, persentase capaiannya sebesar 130%;
7. meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika, persentase capaiannya sebesar 100%; dan
8. membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata internasional, persentase capaiannya sebesar 100%.

Capaian sasaran strategis perspektif layanan dapat dijelaskan seperti berikut.

1. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien, persentase capaiannya sebesar 100%;
2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, persentase capaiannya sebesar 83%; dan
3. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat, persentase capaiannya sebesar 100%.

Terakhir, capaian sasaran strategis perspektif proses internal dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika, persentase capaiannya sebesar 98%;
2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan konten informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat, persentase capaiannya sebesar 109%;
3. Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat, persentase capaiannya sebesar 87%;
4. Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air, persentase capaiannya sebesar 100%;
5. Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika, persentase capaiannya sebesar 96%;
6. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal, persentase capaiannya sebesar 72%; dan
7. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika, persentase capaiannya sebesar 83%.

Secara umum capaian sasaran strategis tahun 2014 telah sesuai dengan target, bahkan ada sasaran strategis yang memperoleh nilai capaian lebih dari 100%. Namun, masih terdapat beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan capaian sasaran strategis. Diharapkan pada masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja untuk mencapai visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2014. Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2104. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, serta sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014 dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kinerja sebagai kontrak kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dan menjadi balikan bagi jajaran Kementerian untuk meningkatkan kinerja setiap unit kerja pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2015
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RUDIANTARA

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif 5
Kata Pengantar 7
Daftar Isi 9

BAB I Pendahuluan
- A. Latar Belakang 17
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 17
- C. Mandat dan Peran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 20
- D. Sistematika Pelaporan 20

BAB II Perencanaan Kinerja
- A. Rencana Strategis 2010—2014 23
- B. Penjanjian Kinerja 27

BAB III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi 35
  1. Sasaran Strategis: Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia (S1.1) 35
  2. Sasaran Strategis: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2) 41
  3. Sasaran Strategis: Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI (S1.3) 42
  4. Sasaran Strategis: Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal (S2.1) 46
  5. Sasaran Strategis: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (S2.2) 48
  6. Sasaran Strategis: Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika (S2.3) 54
  7. Sasaran Strategis: Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.1) 57
  8. Sasaran Strategis: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.2) 59
  9. Sasaran Strategis: Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.3) 60
  10. Sasaran Strategis: Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air (S3.4) 64
  11. Sasaran Strategis: Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika (S4.1) 65
  12. Sasaran Strategis: Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (S4.2) 69
  13. Sasaran Strategis: Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3) 73
  14. Sasaran Strategis: Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4) 74
  15. Sasaran Strategis: Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional (S5.1) 75
  16. Sasaran Strategis: Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika (S5.2) 78
  17. Sasaran Strategis: Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika (S5.3) 80
  18. Sasaran Strategis: Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional (S5.4) 81
- B. Kinerja Lainnya 83
- D. Realisasi Anggaran 87

BAB IV Penutup
- A. Kesimpulan 91
- B. Permasalahan 91
- C. Rekomendasi 91

Daftar tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika 19
Tabel 2.1 Keterkaitan IKU dengan Sasaran Strategis 29
Tabel 3.1 Persentase akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia tahun 2014 35
Tabel 3.2 Target dan realisasi sarana dan prasarana yang mendukung akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia 35
Tabel 3.3 Persentase capaian jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot tahun 2014 36
Tabel 3.4 Target dan realisasi sarana dan prasarana yang mendukung jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot 36
Tabel 3.5 Persentase capaian penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia 37
Tabel 3.6 Target dan realisasi penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia 37
Tabel 3.7 Persentase capaian layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial 38
Tabel 3.8 Target dan realisasi layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial 38
Tabel 3.9 Persentase Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) 39
Tabel 3.10 Target dan realisasi Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) 39
Tabel 3.11 Persentase Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi 40
Tabel 3.12 Target dan realisasi Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi 40
Tabel 3.13 Persentase capaian kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika yang ditetapkan 41
Tabel 3.14 Realisasi kebijakan dan regulasi yang dihasilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011—2014 41
Tabel 3.15 Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) Tahun 2014 41
Tabel 3.16 Target dan realisasi Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) 42
Tabel 3.17 Persentase capaian konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial 43
Tabel 3.18 Kegiatan yang mendukung konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial 43
Tabel 3.19 Persentase capaian fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel tahun 2014 44
Tabel 3.20 Target dan realisasi fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel 44
Tabel 3.21 Persentase capaian data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder 45
Tabel 3.22 Target dan realisasi data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder 45
Tabel 3.23 Persentase capaian utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio tahun 2014 46
Tabel 3.24 Persentase capaian penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 47
Tabel 3.25 Target dan realisasi penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 47
Tabel 3.26 Persentase capaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika 48
Tabel 3.27 Capaian Target PNBP dari Tahun 2011—2014 48
Tabel 3.28 Persentase capaian penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tahun 2014 49
Tabel 3.29 Penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos 49
Tabel 3.30 Prosentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal 50
Tabel 3.31 Target dan realisasi instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal 50
Tabel 3.32 Jumlah Serangan Per Bulan (dalam satuan juta serangan) 51
Tabel 3.33 Tiga Besar Negara Sumber Serangan 51
Tabel 3.34 Tiga Besar Negara Target Serangan 51

Tabel 3.35 Prosentase Jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk 52
Tabel 3.36 Prosentase penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi Tahun 2014 53
Tabel 3.37 Prosentase standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika 54
Tabel 3.38 Target dan realisasi standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika 54
Tabel 3.39 Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas 55
Tabel 3.40 Target dan realisasi kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas 55
Tabel 3.41 Opini hasil audit BPK 56
Tabel 3.42 Persentase sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah) 57
Tabel 3.43 Penyelesaian ICT Utilization Project For Educational Quality Enhacement 57
Tabel 3.44 Target dan realisasi sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah) 57
Tabel 3.45 Persentase capaian Analisis di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Tahun 2014 58
Tabel 3.46 Target dan Realisasi Analisis di Bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra 58
Tabel 3.47 Persentase jumlah paket informasi publik di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Tahun 2014 58
Tabel 3.48 Target dan realisasi paket informasi publik di bidang polhukam, perekonomian dan kesra 58
Tabel 3.49 Persentase jumlah peserta Diklat Kominfo Tahun 2014 59
Tabel 3.50 Target dan realisasi jumlah peserta Diklat Kominfo 59
Tabel 3.51 Persentase jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik Tahun 2014 60
Tabel 3.52 Target dan realisasi jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik 60
Tabel 3.53 Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas)di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu Tahun 2014 61
Tabel 3.54 Target dan realisasi jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik 61
Tabel 3.55 Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi Tahun 2014 62
Tabel 3.56 Realisasi prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi Tahun 2011—2014 63
Tabel 3.57 Prosentase Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media public Tahun 2014 63
Tabel 3.58 Target dan realisasi jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik 63
Tabel 3.59 Persentase aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI) Tahun 2014 64
Tabel 3.60 Target dan realisasi aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI) 65
Tabel 3.61 Persentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika Tahun 2014 66
Tabel 3.62 Target dan realisasi karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika 66
Tabel 3.63 Persentase jumlah pemanfaatan karya riset bidang komunikasi dan informatika untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo Tahun 2014 67
Tabel 3.64 Pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo 67
Tabel 3.65 Persentase Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan Tahun 2014 68
Tabel 3.66 Target dan realisasi jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan 68
Tabel 3.67 Persentase Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik Tahun 2014 70
Tabel 3.68 Target dan realisasi Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik 70
Tabel 3.69 Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika Tahun 2014 71
Tabel 3.70 Target dan realisasi Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika 71
Tabel 3.71 Capaian jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika 72
Tabel 3.72 Target dan realisasi Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika 72
Tabel 3.73 Prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK Tahun 2014 73

Tabel 3.74 Target dan realisasi perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK 73
Tabel 3.75 Prosentase jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat Tahun 2014 75
Tabel 3.76 Prosentase Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia Tahun 2014 75
Tabel 3.77 Prosentase Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi Tahun 2014 76
Tabel 3.78 Target dan realisasi Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi 76
Tabel 3.79 Pertumbuhan Tenant Inkubator 76
Tabel 3.80 Prosentase jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional Tahun 2014 77
Tabel 3.81 Prestasi Indonesia pada APICTA Tahun 2009—2014 78
Tabel 3.82 Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7/2006 Tahun 2014 79
Tabel 3.83 Target dan realisasi Pencapaian TKDN Penyelenggara Seluler 3G sesuai Permenkominfo No.7/2006 79
Tabel 3.84 Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi Tahun 2014 80
Tabel 3.85 Target dan realisasi Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing 81
Tabel. 3.86 Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia/posisi Indonesia dalam fora Internasional Tahun 2014 82
Tabel 3.87 Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia/posisi Indonesia dalam fora Internasional dari tahun 2011—2014 82
Tabel 3.88 Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri Tahun 2014 83
Tabel 3.89 Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri 83
Tabel 3.90 Regulasi yang telah di tetapkan 83
Tabel 3.91 Daftar Proposal Lembaga Penyiaran 85
Tabel 3.92 Daftar Pengaduan Isi Siaran 85
Tabel 3.93 Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2014 87

Daftar gambar

Gambar 1.1 Diagram Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 18
Gambar 1.2 Alur Perubahan Struktur Organisasi 19
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika 19
Gambar 1.4 Alur Mandat dan Peran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 20
Gambar 1.5 Alur Pikir Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 20
Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika 28
Gambar 3.1 Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia 36
Gambar 3.2 Jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah nonkomersial lain untuk mengurangi daerah blank spot 37
Gambar 3.3 penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia 38
Gambar 3.4 layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial 39
Gambar 3.5 Ibu kota kabupaten/kota yang terhubung secara pita lebar 39
Gambar 3.6 Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) 39
Gambar 3.7 Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi 38
Gambar 3.8 Roadmap TV Digital 40
Gambar 3.9 Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) Tahun 2011—2014 42
Gambar 3.10 Konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial 43
Gambar 3.11 Fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel 44
Gambar 3.12 Utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio 46
Gambar 3.13 Penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit 47
Gambar 3.14 Target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika 48
Gambar 3.15 Instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal 50
Gambar 3.16 Gambar Tingkat Keseriusan (High) Dalam Rentan Waktu Januari – Desember 2014 51
Gambar 3.17 Target dan Realisasi Jangkauan jaringan TVRI terhadap populasi penduduk 52
Gambar 3.18 Target dan Realisasi Jangkauan jaringan RRI terhadap populasi penduduk 52
Gambar 3.19 Persentase capaian penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi 53
Gambar 3.20 Kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas 55
Gambar 3.21 Sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah) 57
Gambar 3.22 Jumlah peserta Diklat Kominfo 59
Gambar 3.23 Jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik 60
Gambar 3.24 Aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas)di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu 62
Gambar 3.25 Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik 64
Gambar 3.26 Karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika 66
Gambar 3.27 Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan 69
Gambar 3.28 Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik 70
Gambar 3.29 Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik 71
Gambar 3.30 Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika 72
Gambar 3.31 Perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK 73
Gambar 3.32 Data UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business berdasar bidang usaha Tahun 2014 74
Gambar 3.33 Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia 75
Gambar 3.34 Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi 76
Gambar 3.35 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara APICTA pada tahun 2014 78
Gambar 3.36 TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7/2006 79
Gambar 3.37 TKDN Capex Tahun Buku 2011 – 2013 80

Gambar 3.38 TKDN Opex Tahun Buku 2011 - 2013 ____ 80
Gambar 3.39 Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi ____ 81
Gambar 3.40 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 ____ 87

1 Pendahuluan

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi katalisator faktor produksi dan ekonomi, TIK juga berperan sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Melalui TIK pula, kemajuan ilmu pengetahuan yang mencerdaskan mampu tersebar dan terdistribusi secara luas di masyarakat, membentuk dan membangun bangsa yang mandiri, cerdas dan berkarakter.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur TIK yang konstruktif. Hal ini menjadi tugas pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebagai eksekutor dan regulator untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana TIK. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut disusun dan dikembangkan menjadi program berkelanjutan selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014.

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014, yaitu:

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

Dalam mencapai visi dan misi tersebut ditetapkan sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun. Pelaksanaan rencana kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKi), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2014, serta sebagai sumber informasi untuk mengukur pencapaian pelaksanaan rencana strategis 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2014 ini tidak hanya menjadi uraian capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2014, tetapi juga menjadi cerminan capaian kinerja 5 tahun yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014. Di samping itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan pemerintahan yang baik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Kinerja ini juga merupakan suatu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti diuraikan di atas, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
b. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika dibantu oleh unit-unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi seperti tercantum pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;

5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya;
10. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa;
11. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi;
12. Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT)/ Unit Kerja Mandiri yang terdiri atas Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI), Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta, Monumen Pers, Museum Penerangan, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Balai Pelatihan dan Riset TIK (BPRTIK), dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Komunikasi dan Informatika secara terperinci dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Diagram di atas merupakan struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 menggantikan struktur organisasi lama yang mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 25 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014 beserta indikator kinerja utama (IKU) merupakan dokumen yang disusun sesuai dengan struktur organisasi lama. Alur perubahan struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut.

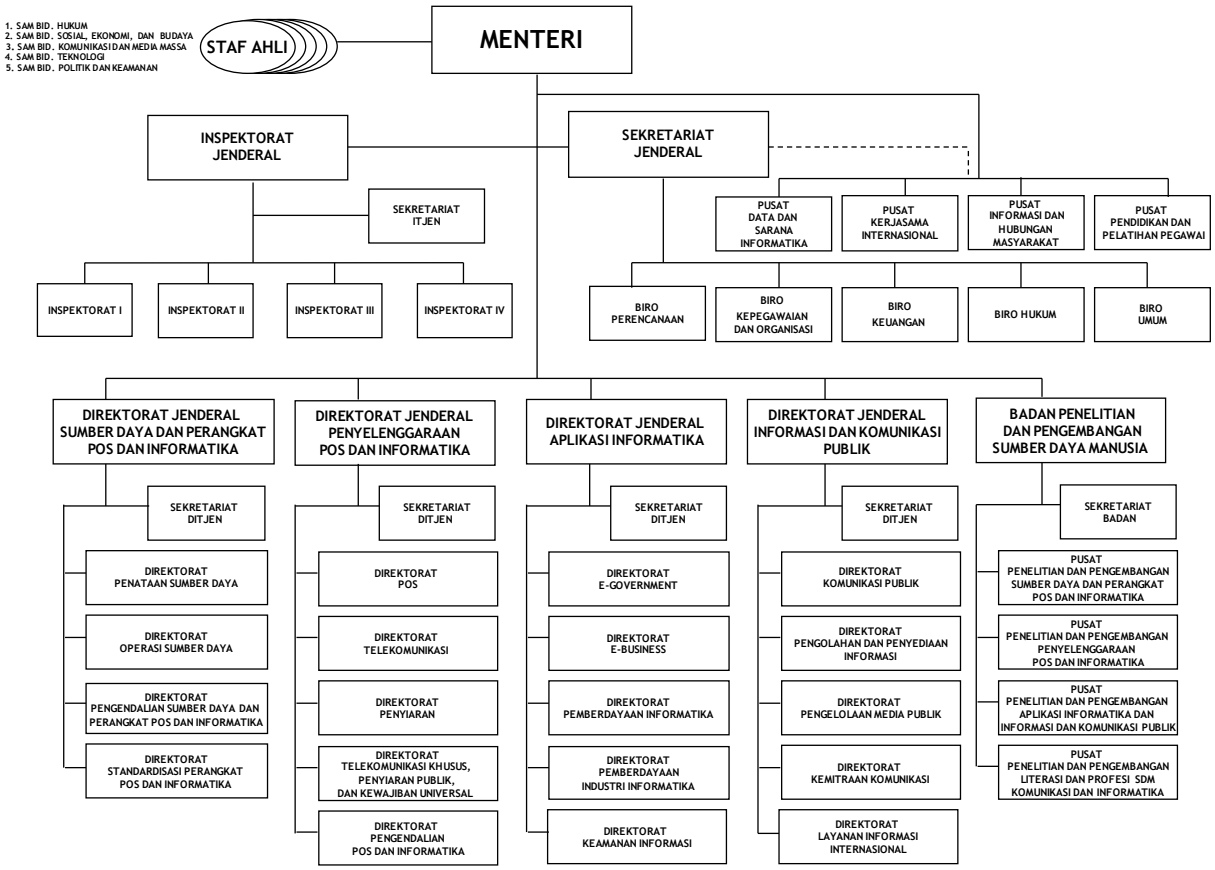

Gambar 1.1 Diagram Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

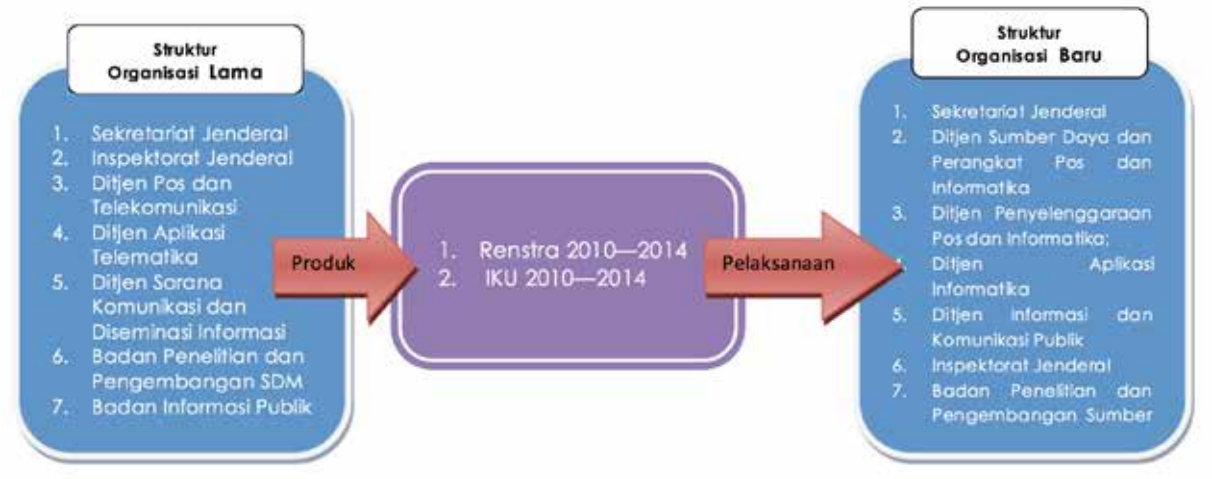

Gambar 1.2 Alur Perubahan Struktur Organisasi

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2, sejak ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, terjadi perubahan struktur dan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebabkan capaian kinerja tahun 2010 tidak dapat dilaporkan. Jadi, Laporan Kinerja ini tidak mengacu sepenuhnya pada periode lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Renstra Kominfo 2010-2014, melainkan hanya mencakup periode 2011--2014.

Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2010, dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.584 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian. Jumlah dan komposisi pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Unit Kerja	SD	SMP	SMA	SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Profe-sor	Total Pegawai
Setjen	12	17	119	55	0	0	32	3	236	72	5	0	551
Itjen	0	1	14	10	0	0	5	1	49	15	0	0	95
Ditjen SDPPI	18	20	311	316	0	1	130	0	465	104	3	0	1368
Ditjen PPI	0	2	51	36	0	0	18	8	166	62	3	1	347
Ditjen APTIKA	1	3	36	14	0	0	9	1	116	38	1	0	219
Ditjen IKP	5	4	97	38	0	0	23	2	134	41	0	0	344
Balitbang SDM	9	4	155	12	5	1	32	16	314	101	9	2	660
Jumlah	45	51	783	481	5	2	249	31	1480	433	21	3	3584

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

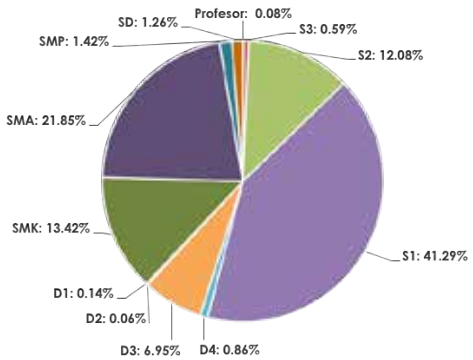

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

C. Mandat dan Peran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai peran yang strategis dalam arah pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO), dan sebagai seorang pimpinan dari suatu Kementerian yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membangun, menerapkan, mengembangkan, memelihara, dan mengawasi pengembangan TIK menjadikan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Chief Technology Officer (CTO). Sementara itu untuk merencanakan dan mengembangkan aristektur sistem informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika pada hakekatnya adalah Chief Information Officer (CIO). Dengan demikian, Menteri Komunikasi dan Informatika adalah COO, CTO sekaligus sebagai CIO. Prinsip itu harus dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances, serta untuk mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

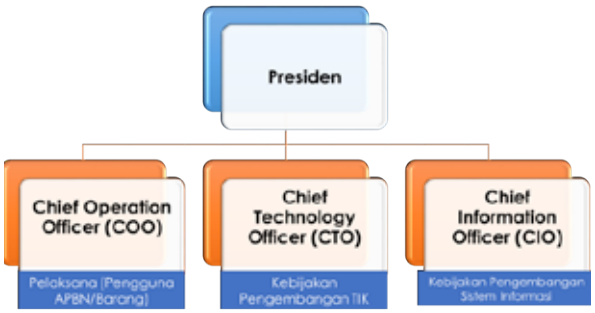

Gambar 1.4 Alur Mandat dan Peran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
   Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta isu utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja
   Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
   A. Capaian Kinerja Organisasi
   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
   1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
   2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
   3. membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
   4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
   5. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
   6. menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
   7. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

   B. Realisasi Anggaran
   Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup
   Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dengan sistematika tersebut menggunakan alur pikir yang dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 1.5 berikut ini.

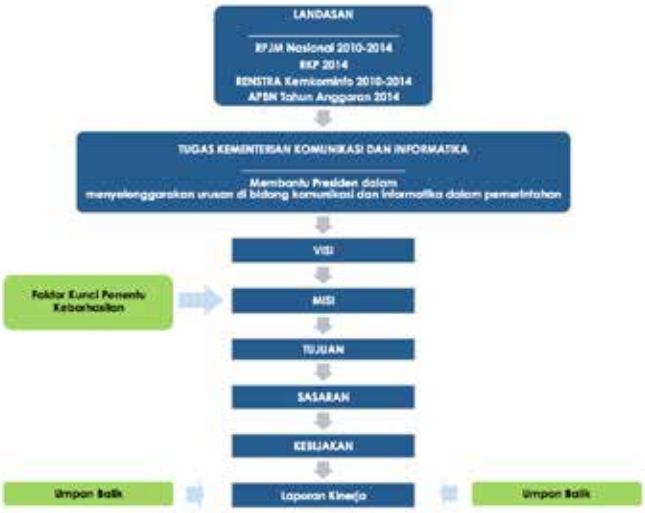

Gambar 1.5 Alur Pikir Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014

2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 2010-2014

Rencana strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif. Rencana Strategis merupakan bagian yang terintegrasi dari bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki relevansi terhadap pengungkapan kinerja, serta merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan per tahun yang merupakan rangkaian pembangunan bidang komunikasi dan informatika berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) 2010—2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014. Renstra disusun dengan berorientasi pada keberhasilan pelaksanaan RPJMN untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden.

Dalam kurun waktu 2010—2014 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut berpandangan jauh ke depan, serta berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional. Berkaitan dengan itu, setiap aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya masyarakat informatif Indonesia.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan selama 5 (lima) Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran serta rencana kerja yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Dalam rangka pencapaian-pencapaian tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
2. mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
3. mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa;
4. mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan; dan
5. memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun ke depan dalam tahun 2010—2014, serta menggambarkan arah strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2010—2014 dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tujuan utama sebagai berikut:

1. Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi
   a. Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (competition readiness index) baik, yaitu sekurang-kurangnya 49% dari total jumlah provinsi di seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51% dengan indeks menengah.
   b. Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) jangkauan layanan pos universal mencapai 100% di wilayah PSO; (b) jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi (USO); serta (c) jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 88% dan 90%.
   c. Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50%; (b) tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30%; (c) tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 35%; (d) jaringan backbone telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau besar mencapai 100%; serta (e) jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung/terintegrasi ke dalam jaringan backbone serat optik nasional Palapa Ring mencapai sekurang-kurangnya 60% dari total ibukota kabupaten/kota, termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013.

d. Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial dengan indikator dan dampat target capaian tahun 2014 : (a) desa yang dilayani akses internet mencapai 80%; (b) Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara broadband mencapai 75%; (c) Ibukota provinsi yang memiliki national internet exchange mencapai 100% dengan catatan pelaksanaannya memenuhi kelayakan operasional;(d) Ibu kota provinsi yang memiliki international internet exchange mencapai 100% yang terdiri dari 4 Ibukota provinsi, untuk ibukota provinsi yang lain, akan dibangun sesuai dengan kelayakan operasional;
e. Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit mencapai 95%; (b) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung siaran TV Digital mencapai 50% wilayah jangkauan yang meliputi populasi. Terkait dengan ini akan digunakan band frekuensi yang layak secara teknis dan ekonomis (bukan di frekuensi 108 MHz yang diperuntukkan untuk penerbangan), sedangkan target disesuaikan dengan program digitalisasi;
f. Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) tingkat utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio mencapai 70% (target capaian 100% sangat terpengaruh oleh pemanfaatan Spektrum Radio yang sangat tergantung pada nilai ekonomis dari suatu wilayah dan ketertarikan investor); (b) pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP mencapai 100%; (c) pengembangan sarana dan prasarana perizinan mencapai 100%; (d) pelayanan spektrum frekuensi yang diproses tepat waktu mencapai 95% (target 100% dapat tercapai apabila tidak terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin).
g. Kebijakan, regulasi, perizinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) verifikasi terhadap pelaksanaan PSO Pos mencapai 100%; (b) pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos diharapkan akan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai jika tidak terkendala oleh faktor eksternal : iklim/cuaca dan tranportasi);
h. Kebijakan, regulasi, perizinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) penetapan regulasi teknis infrastruktur menuju era konvegensi mencapai 100%, dengan jumlah paket disesuaikan dengan kebutuhan; (b) kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi mencapai 90% (pada praktek untuk mencapai target 100% sulit, namun demikian telah disiapkan instrumen denda bagi penyelenggara yang tidak patuh); (c) kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi diharapkan akan mencapai 100%; (d) penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP, akan selesai 100%;
i. Kebijakan, regulasi, perizinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri mencapai 100%; (b) ketepatan penyelesaian layanan perizinan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai apabila didukung oleh mekanisme perizinan yang melibatkan beberapa instansi, dapat berjalan dengan baik); (c) penyusunan Grand design dan Road Map Penyelenggaraan Penyiaran, mencapai 100%;
j. Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 80% (target 100% terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi dan layanan elektronik); (b) sistem informasi pekerja migran akan mencapai 24 paket beserta operasional dan pemeliharaan;
k. Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran, dengan indikator dan capaian tahun 2014 antara lain : peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten mencapai 90% (tingkat kesulitan untuk mencapai target 100% cukup tinggi, karena berkembangnya keberagaman perangkat yang digunakan);
l. Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50% pada tahun 2014.
m. Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) nilai rata-rata e-government instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4 dari keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkala); (b) jumlah aparatur pemerintah yang paham Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekurang-kurangnya menjadi 80% dari total aparatur pemerintah; (c) prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi mencapai 100%; serta (d) tersedianya layanan publik yang dapat diakses

secara online sekurang-kurangnya untuk layanan kependudukan (e-citizen), perizinan (e-licensing), dan pengadaan (e-procurement).

n. Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) prosentase alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 30%; (b) prosentase jumlah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 40%; dan (c) prosentase TKDN set top box TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30%.

2. Bidang Komunikasi dan Informasi
   a. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI , dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain: (a) penguatan media center di provinsi/ kabupaten kota untuk 15 media center; (b) aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada masyarakat mencapai 80%;
   b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain: (a) peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (Kelompok Informasi Masyarakat-KIM, media tradisional, dan media komunitas) di wilayah perbatasan yang dilaksanakan tepat waktu mencapai 80%; (b) fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel mencapai 90%;
   c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar infomasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) pelaksanaan bimbingan teknik CIO untuk 2.500 orang peserta; (b) pelaksanaan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencapai 2.500 orang; (c) pelaksanaan program pemberian bea siswa bidang komunikasi dan informasi untuk 1.398 mahasiswa; (d) peningkatan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi sejumlah 40 paket; dan (e) sertifikasi SDM komunikasi dan informasi mencapai 4.980 orang.

Untuk menjabarkan tujuan tersebut agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut:

1. meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatikadi seluruh Indonesia (S1.1);
2. terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2);
3. tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI (S1.3);
4. terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal (S2.1);
5. terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (S2.2);
6. tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika (S2.3);
7. tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat (S3.1);
8. terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat (S3.2);
9. tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.3);
10. terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing, dan cinta tanah air (S3.4);
11. mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika (S4.1);
12. mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (S4.2);
13. mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3);
14. mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4);
15. mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional (S5.1);
16. mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika (S5.2);
17. meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika (S5.3); dan,
18. membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional (S5.4).

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencapai 18 (delapan belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
   Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi semua kegiatan industri, perdagangan, manajemen, maupun sosial sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-kegiatan tersebut.

Melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan informasi diharapkan dalam jangka panjang akan dapat terbentuk masyarakat Indonesia yang semua kegiatannya didasarkan pada pengetahuan, baik yang diperolehnya dari pengalaman sendiri maupun dari sumber yang memuat pengalaman, pemikiran, analisis orang lain. Dengan arah kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Terkait dengan rantai nilai komunikasi dan informatika , perlu dirumuskan arah kebijakan yang dikaitkan dengan tahap-tahap pada rantai nilai tersebut supaya nilai tambah yang diberikan pada tiap tahap rantai nilai adalah maksimal. Dengan mempertimbangkan fenomena konvergensi dari telekomunikasi, internet, dan media yang terjadi saat ini, kecuali di sektor pos, arah kebijakan bidang komunikasi dan informatika tidak lagi membedakan adanya sektor telekomunikasi, pers, penyiaran, media yang vertikal tersebut mengingat media apa saja telah dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi apa saja. Dalam era konvergensi, pemisahan yang justru lebih tampak jelas adalah secara horizontal yang membedakan sumber daya, infrastruktur, jasa, dan kandungan informasi.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika
   Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika nasional, maka rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014 ini adalah sebagai berikut:
   a. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumber daya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis, dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumber daya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggungjawab.
   b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat.
   c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan. Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya saling-ganggu.
   d. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.
   e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. Usaha-usaha pembangunan kapasitas sumber daya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal.
   f. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi, dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara.
   g. Mendorong industri TIK dalam negeri. Untuk menjamin kepentingan bangsa dan negara, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika harus dapat dilaksanakan secara merata oleh bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan industri perangkat, jasa, dan konten nasional. Dengan demikian rantai pasok kegiatan ekonomi dalam negeri terkait

dengan bidang komunikasi dan informatika dapat diperpanjang, sehingga efek pengalinya bertambah besar. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan peran bidang komunikasi dan informatika dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kontribusi bidang ini terhadap PDB nasional. Semakin panjangnya rantai pasok dalam negeri akan dapat membuat kontribusi terhadap PDB menjadi semakin tinggi.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan, dan sasaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun program-program strategis. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapatkan suatu hasil. Program-program yang telah ditetapkan dalam Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika;
4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik;
5. Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian komunikasi dan Informatika;
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika.

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2010 tanggal 29 Januari 2010 merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja lebih menjelaskan secara detail mengenai pelaksanaan program sampai level kegiatan (yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk satuan kerja setingkat Eselon II) yang dilengkapi dengan informasi mengenai milestone tahunan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014, dan merupakan ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu satuan kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, dokumen Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010—2014. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan kemudian dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memuat 18 Sasaran Strategis seperti terlihat pada gambar berikut.

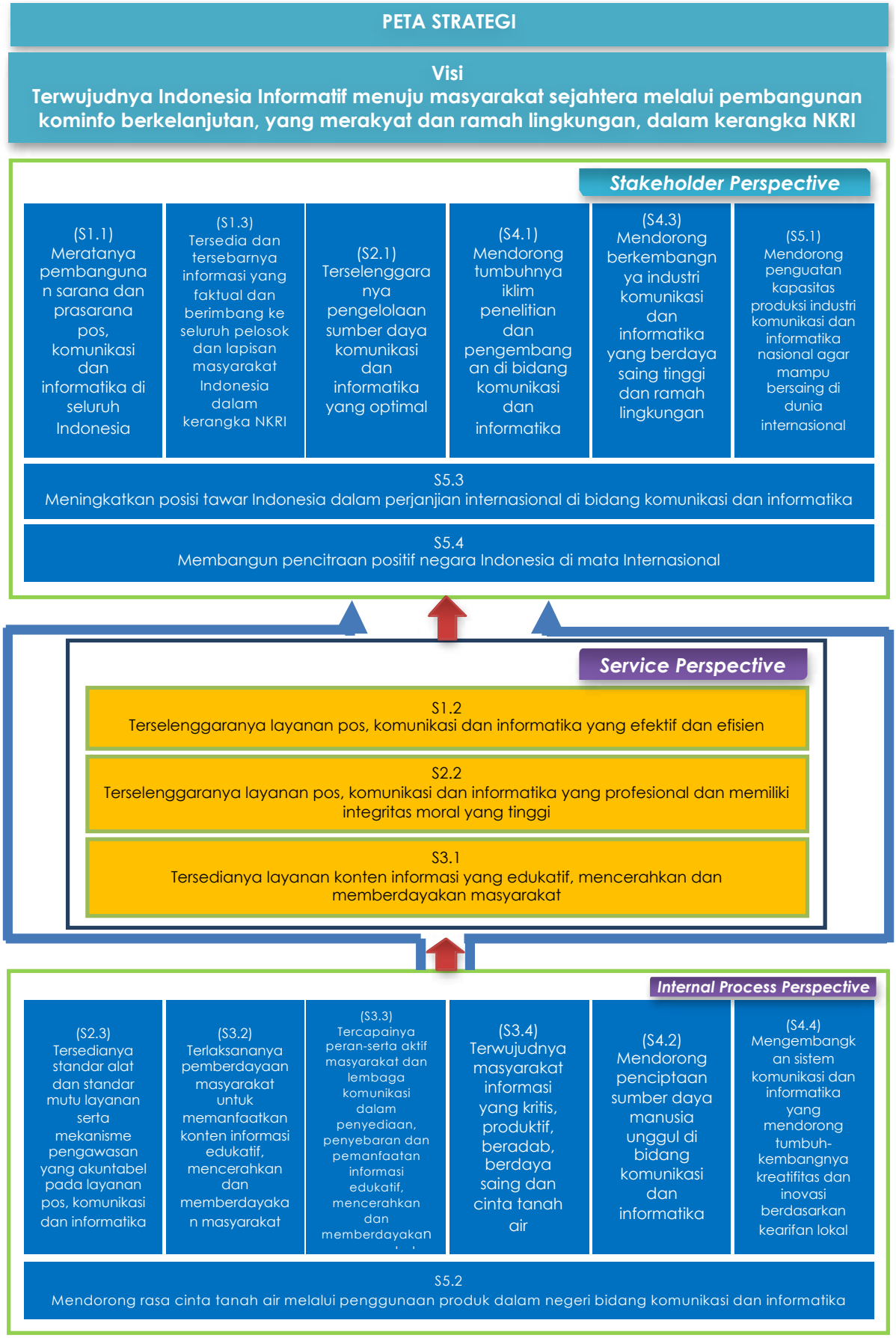

Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peta strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika di atas menerapkan 3 (tiga) perspektif, yaitu: perspektif stakeholders, perspektif layanan dan perspektif proses internal. Dari Peta Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mencapai 18 (delapan belas) sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) IKU. Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 1: Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia (S1.1)	IK1.1	Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia	%	90
	IK1.2	Prosentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot	%	90
	IK1.3	Prosentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar wilayah Indonesia	%	100
	IK1.4	Prosentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	%	100
	IK1.5	Prosentase Kabupaten/ kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)	%	80
	IK1.6	Prosentase (%) Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi	%	50
Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2)	IK2.1	Prosentase (%) kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika	%	100
	IK2.2	Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB)	Instansi	9
Sasaran Strategis 2: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2)	IK3.1	Prosentase konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial	%	100
	IK3.2	Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	%	100
	IK3.3	Prosentase data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder	%	100
	IK4.1	Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio	%	100
	IK4.2	Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit	%	100
	IK4.3	Prosentase pencapaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika	%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (S2.2)	IK5.1	Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos	%	100
	IK5.2	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal	%	100
	IK5.3	Prosentase Jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk	%	88% (TVRI), 90% (RRI)
	IK5.4	Prosentase penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi	%	100
Sasaran Strategis 6: Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika (S2.3)	IK6.1	Prosentase standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika	%	100
	IK6.2	Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas	%	85
	IK6.3	Opini hasil Audit BPK	-	WTP
Sasaran Strategis 7: Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.1)	IK7.1	Prosentase (%) sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah)	%	100
	IK7.2	Jumlah analisis di bidang polhukam, perekonomian dan kesra	Analisis	300
	IK7.3	Jumlah paket informasi publik di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra	Dokumen	3
Sasaran Strategis 8: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.2)	IK8.1	Jumlah peserta diklat literasi kominfo	Orang	7.089
Sasaran Strategis 9: Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.3)	IK9.1	Jumlah Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik yang mampu meningkatkan peranya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik	Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik	350
	IK9.2	Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	%	80
	IK9.3	Prosentase aktifitas yang efektif untuk mendorong media literasi	%	100
	IK9.4	Jumlah aktivitas penguatan lembaga/ media publik	%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 10: Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air (S3.4)	IK10.1	Persentase aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI)	Laporan	160
Sasaran Strategis 11: Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika (S4.1)	IK11.1	Prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika	%	40
	IK11.2	Jumlah pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	Dokumen	5
	IK11.3	Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	Disain	4
Sasaran Strategis 12: Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (S4.2)	IK12.1	Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik	Orang	5.000
	IK12.2	Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	%	100
	IK12.3	Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika	Orang	2.000 orang dan 445 orang penerima beasiswa S2
Sasaran Strategis 13: Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3)	IK13.1	Prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK	%	100 (300 UKM dan 2 unit pusat layanan e-bisnis)
Sasaran Strategis 14: Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4)	IK14.1	Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat	Karya	100
	IK14.2	Jumlah aplikasi/ software/ content/ digital Indonesia	Karya	700
Sasaran Strategis 15: Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional (S5.1)	IK15.1	Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi	Lokasi	4
	IK 15.2	Jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional	Karya	10
Sasaran Strategis 16: Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika (S5.2)	IK16.1	Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006	%	90

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
Sasaran Strategis 17: Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika (S5.3)	IK17.1	Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi	%	100
Sasaran Strategis 18: Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional (S5.4)	IK18.1	Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia / posisi Indonesia dalam fora internasional	%	100
	IK18.2	Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri	Kegiatan	47

Tabel 2.1 Keterkaitan IKU dengan Sasaran Strategis

3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas kinerja yang sudah diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010—2014. Pengukuran kinerja indikator masing-masing yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi organisasi selama periode 2010—2014.

Hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informasi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut.:

1. Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi, dan informatika di seluruh Indonesia (S1.1)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan enam IKU dengan capaian indikator masing-masing dijelaskan sebagai berikut.

1.1 Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (IK1.1)

Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia diukur dari banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2014.

Perkembangan jumlah pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun meliputi meningkatnyajumlah:

1. desa punya internet (Desa Pinter),
2. kabupaten yang memiliki layanan WiFi,
3. Sentra Produktif dan Pemekaran Desa Dering Pinter,
4. ibu kota provinsi yang memiliki Nusantara Internet Exchange (NIX),
5. ibu kota provinsi yang memiliki Pertukaran Internet Internasional (International Internet Exchange, IIX), dan
6. KPC LPU yang mendapatkan dana PSO Pos.

Perkembangan jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika tampak pada Tabel 3.2.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia	90%	88%

Tabel 3.1 Persentase akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Desa Punya Internet (PINTER) yang beroperasi	1.461 SSL	100 SSL	298 SSL	1.430 SSL	1.430 SSL
Jumlah Kabupaten yang memiliki layanan WiFi	745 PoP	-	134 PoP	553 PoP	709 PoP
Jumlah PLIK Sentraproduktif dan Pemekaran Desa Dering Pinter	1.235 PLIK	-	358	1.222	1.235
Jumlah Ibu kota Provinsi yang memiliki Nusantara Internet Exchange (NIX)	33 NIX	4	8	9	19
Jumlah Ibu kota provinsi yang memiliki Internasional Internet Exchange (IIX)	4 IIX	-	1	3	3
Jumlah KPC LPU yang mendapat-kan dana PSO Pos	9.258 KPCLPU	2.278	4.576	6.933	9.258

Tabel 3.2 Target dan realisasi sarana dan prasarana yang mendukung akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia

Dari tabel di atas, dapat digambarkan pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pencapaian indikator kinerja akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia dari tahun 2011—2014 terlihat pada Gambar 3.1. (Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia)

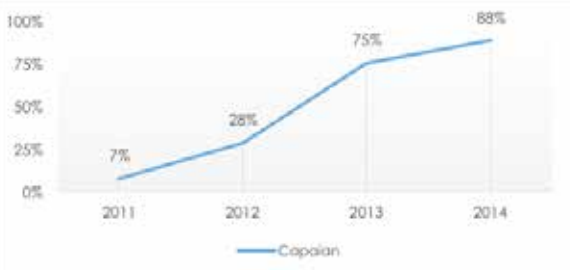

Gambar 3.1 Akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia

Sebagaimana gambar di atas, pencapaian indikator kinerja akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Hal itu berarti bahwa masyarakat Indonesia makin mudah mengakses informasi melalui sarana dan prasarana yang telah disediakan pemerintah.

Sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta mewujudkan kecerdasan. Hal itu dapat ditunjukkan dalam beberapa referensi tentang perkembangan ekonomi dan sosial yang diterbitkan, baik oleh Badan Pusat Statitik (BPS), World Bank maupun oleh pihak lain yang berkompeten. Namun, sampai akhir tahun 2014 kinerja belum dapat mencapai target, karena kendala penetapan lokasi yang tepat, proses perizinan (IMB), faktor geografis, demografi, cuaca, keamanan, dan terbatasnya ketersediaan sumber daya listrik pada lokasi penyediaan sarana dan prasarana akses komunikasi dan informatika.

1.2 Persentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah nonkomersial lain untuk mengurangi daerah blank spot (IK1.2)

Jangkauan layanan komunikasi dan informatika di semua desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah nonkomersial lain untuk mengurangi daerah blank spot diukur dari banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2014.
Pengukuran kinerja terhadap indikator yang dimaksud diperoleh capaian sebesar 101% dari target 90%. Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pembangunan Base Transmission Station (BTS) telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (Telinfo-Tuntas), penyediaan pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan penyediaan akses telepon dengan pembangunan Desa Dering.

Pencapaian target sarana dan prasarana tersebut terlihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non-komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot	90%	101%

Tabel 3.3 Persentase capaian jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Base Transmission Station (BTS) telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (Telinfo-Tuntas)	286 BTS	-	18 BTS	286 BTS	286 BTS
Jumlah PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang beroperasi*	5.748 PLIK	5.748 PLIK	5.939 PLIK	5.956 PLIK	5.956 PLIK
Jumlah Desa Dering yang Beroperasi*	33.185 SSL	30.413 SSL	31.092 SSL	32.918 SSL	33.184 SSL

Tabel 3.4 Target dan realisasi sarana dan prasarana yang mendukung jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot

Berdasarkan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia, seperti ter-lihat pada tabel di atas, rata-rata pencapaian kinerja terhadap indikator persentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah nonkomersial lain untuk mengurangi daerah blank spot dari tahun 2011—2014 terlihat pada Gambar 3.2. (Jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah nonkomersial lain untuk mengurangi daerah blank spot)

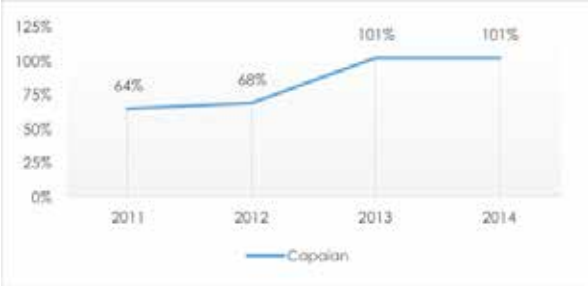

Gambar 3.2 Jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi blank spot

Secara keseluruhan pencapaian terhadap target indikator kinerja jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non- komersial lain untuk mengurangi blank spot pada tahun 2014 telah tercapai.

Program Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO merupakan salah satu upaya penyediaan jaringan akses telekomunikasi di daerah perbatasan dan pulau terluar dalam rangka melayani masyarakat di dearah tersebut dan memperkukuh pertahanan dan keamanan nasional. Dengan adanya layanan tersebut, diharapkan akses informasi dapat berjalan lancar dan dapat mempertebal rasa memiliki masyarakat di kawasan tersebut.

Sarana dan prasarana tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk mempermudah akses informasi sehingga berbagai upaya sudah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencapai target, antara lain dengan mendata ulang wilayah yang termasuk ke dalam Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) sehingga pada tahun 2014 target dapat tercapai.

1.3 Persentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antarwilayah Indonesia (IK1.3)

Penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antarwilayah Indonesia diukur dari seberapa banyak ibu kota provinsi yang terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik nasional dibandingkan dengan jumlah ibu kota provinsi yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2014.

Perkembangan pencapaian target indikator kinerja penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia dari tahun 2011—2014 terlihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja terhadap indikator persentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antarwilayah Indonesia dari tahun 2011—2014 tersaji pada Gambar 3.3 (penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia)

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar-wilayah Indonesia	100%	100%

Tabel 3.5 Persentase capaian penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Ibu kota prov yang terhubung dengan jaringan tulang punggung serat optik nasional	100% (33 provinsi)	88% (29 Prov)	88% (29 prov)	91% (30 prov)	100% (33 prov)

Tabel 3.6 Target dan realisasi penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia

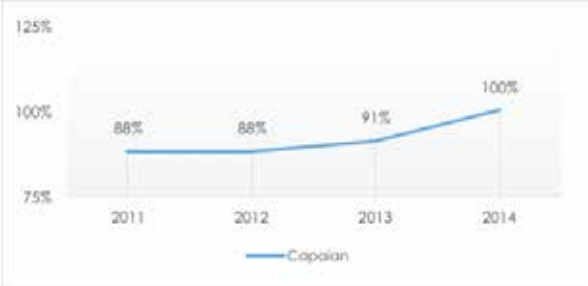

Gambar 3.3 penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang dapat menghubungkan antar wilayah Indonesia

Sampai tahun 2014, pembangunan jaringan serat optik nasional telah dilaksanakan di 33 provinsi (tercapai 100%). Keberhasilan dalam mencapai kinerja tersebut diharapkan dapat mempercepat tingkat investasi di provinsi masing-masing sehingga dapat mendorong berbagai inovasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Di samping itu, manfaat lainnya dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah:

1. meningkatkan penggunaan Resources ICT Infrastructure secara Nasional dalam mewujudkan jaringan dan layanan konvergensi.
2. hambatan pertukaran informasi antarmasyarakat, antardaerah di dalam wilayan NKRI.
3. memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk informasinya diakses dan mengakses informasi domestik dan global dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi masyarakat.
4. mendorong tumbuhnya industri kreatif yang memerlukan pita lebar (bandwidth) dan kecepatan tinggi.

1.4 Persentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah Nonkomersial (IK1.4)

Peningkatan layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah nonkomersial diukur dari banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010—2014.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terealisasi sebesar 57% dari target 100% yang ditetapkan. Adapun jumlah sarana dan prasarana yang terbangun yang dihasilkan melalui penyediaan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan jasa penyiaran radio komunitas di daerah perbatasan, dan penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang beroperasi.

Pencapaian target sarana dan prasarana yang dibangun dari tahun 2011—2014 terlihat pada Tabel 3.7 dan Gambar 3.4 di bawah ini.

Sebagaimana gambar di atas, pada tahun 2014 kinerja belum tercapai 100%. Hal itu karena pembangunan desa informasi baru tercapai sebanyak 200 desa dan yang dilengkapi radio komunitas hanya 80 desa (57%) dari target 500 desa informasi yang dilengkapi radio komunitas. Pencapaian itu tidak optimal karena kendala geografi. Akibatnya, sulit menjangkau daerah terpencil dan karena masih terkendala oleh peraturan, penyediaan radio komunitas pada desa informasi belum dapat dilakukan.

Diharapkan seluruh sarana dan prasarana tersebut dapat mendukung perkembangunan pembangunan di daerah sehingga dapat meningkatkan layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah nonkomersial.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	100%	57%

Tabel 3.7 Persentase capaian layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi Radio Komunitas*	500 desa	80 desa	80 desa	80 desa	80 desa
Jumlah Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang beroperasi*	1.907 MPLIK	846 MPLIK	1.802 MP-LIK	1.857 MP-LIK	1.857 MP-LIK

Tabel 3.8 Target dan realisasi layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

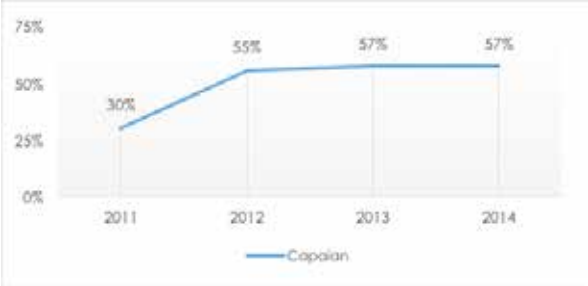

Gambar 3.4 layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

1.5 Persentase Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) (IK1.5)

Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) diukur dari banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terealisasikan sebesar 87% dari target 80% yang ditetapkan dalam renstra. Jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun meliputi jumlah ibu kota kabupaten/kota yang terhubung secara pita lebar, yaitu 431 kabupaten/kota dari target 497 kabupaten/kota. Artinya, kinerja yang telah tercapai sebesar 87%.

Penyediaan layanan akses nirkabel di seluruh ibu kota kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Palapa Ring bekerja sama dengan operator telekomunikasi. Penjelasan pencapaian target terhadap kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) tampak pada Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 di bawah ini.

Capaian pada tahun 2014 sebesar 87% ibu kota kabupaten/kota tersebut merupakan hasil dari penyediaan layanan pita lebar oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan Gambar di atas pertumbuhan layanan akses nirkabel pita lebar (BWA) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Diharapkan pada tahun 2015 seluruh ibu kota kabupaten/kota dapat terhubung secara pita lebar. Dengan demikian, dapat disediakan akses komunikasi yang berdaya jangkau luas, terutama untuk Indonesia kawasan timur.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Persentase kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)	80%	87%

Tabel 3.9 Persentase Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Ibu kota kabupaten/ kota yang terhubung secara broadband	398 Kabupaten/Kota (80%)	323 Kabu-paten/ Kota (65%)	343 Kabu-paten/ Kota (69%)	368 Kabu-paten/ Kota (74%)	431 Kabupaten/ Kota (87%)

Tabel 3.10 Target dan realisasi Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)

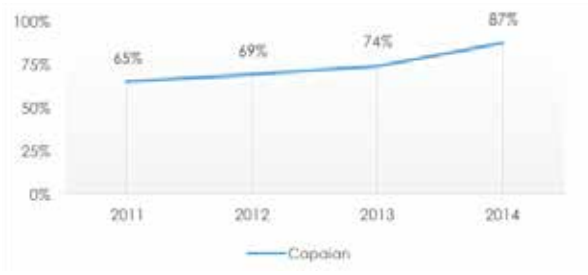

Gambar 3.5 Ibu kota kabupaten/kota yang terhubung secara pita lebar

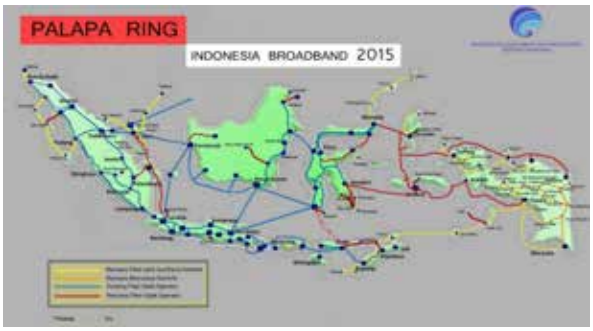

Gambar 3.6 Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)

1.6 Persentase (%) Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi (IK1.6)

Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi diukur dari seberapa banyak sarana dan prasarana yang telah dibangun dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang direncanakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terealisasi sebesar 57% dari target 50% dalam Renstra. Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital sudah dilaksanakan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau.

Penjelasan pencapaian target terhadap implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi terlihat Tabel 3.9 dan Gambar 3.6 di atas.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi (*).	50%	57%

Tabel 3.11 Persentase Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi

(*)Indikator diatas merupakan indikator kinerja utama yang ada di dalam Renstra Kemkominfo 201--2014, namun pada tahun 2014 tidak tercantum pada dokumen Penetapan Kinerja

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
% Penetrasi Siaran TV Dgital Terhadap Populasi	50%	12%	17%	25%	57%

Tabel 3.12 Target dan realisasi Implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital terhadap populasi

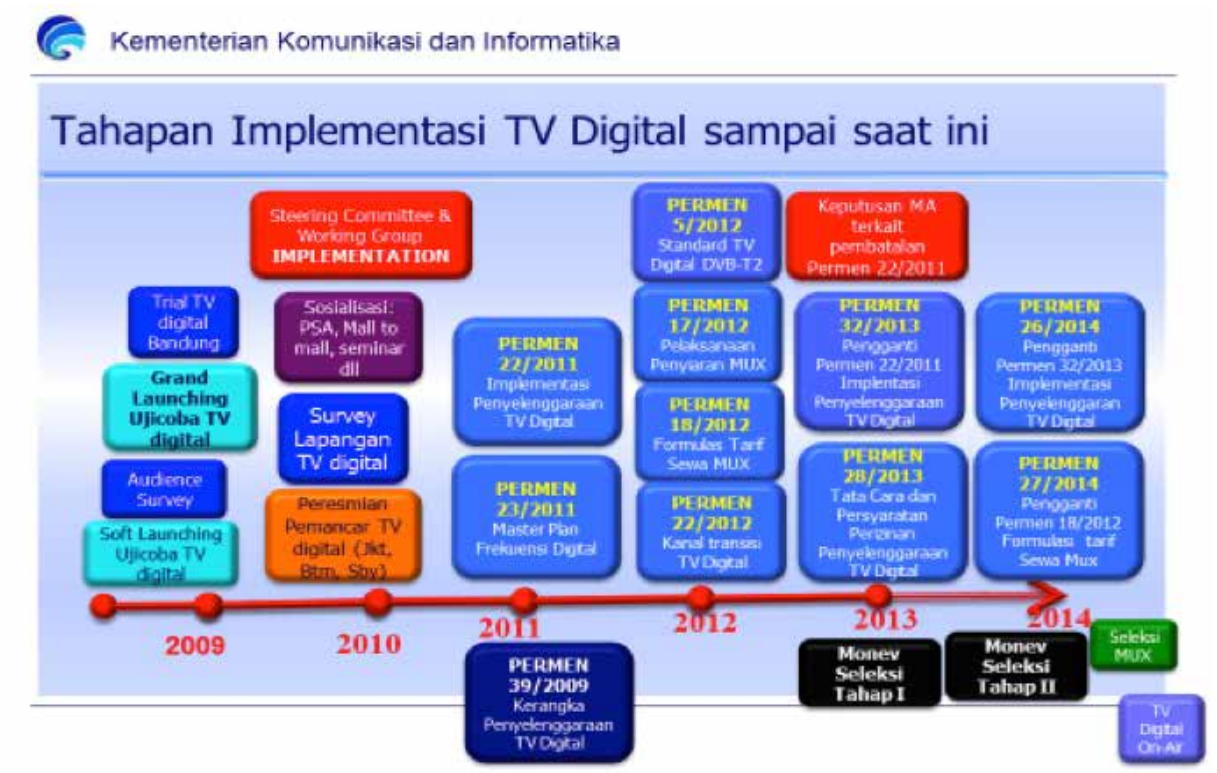

Gambar 3.8 Roadmap TV Digital

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa proses migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital telah berjalan dengan baik. Implementasi sistem penyiaran digital harus direncanakan dengan matang, disusun peta jalannya yang jelas dan terarah, dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu perlu dilakukan agar peralihan dari analog ke digital tidak merugikan dan membebani masyarakat.

Banyak keuntungan dari implementasi penyiaran televisi digital terestrial di Indonesia. Dengan siaran TV digital, masyarakat akan dapat menonton siaran TV dengan gambar dan suara yang lebih jernih dan lebih tajam dibandingkan dengan siaran analog. Melalui siaran digital, pemakaian frekuensi radio lebih optimal dan efisien sehingga dapat menyalurkan lebih banyak program siaran dalam satu kanal frekuensi. Hal itu membuka peluang usaha konten siaran sehingga akan menambah keberagaman dan kuantitas program siaran yang dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, biaya operasional penyelenggaraan penyiaran TV digital lebih efisien dibandingkan dengan penyiaran analog.

2. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien (S1.2)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 2 (dua) IKU dengan masing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika.

Dari tabel di atas telah tercapai realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum dan disusun tepat waktu terkait bidang komunikasi dan informatika. Kebijakan dan regulasi yang telah berhasil disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 2011—2014 sebagaimana pada Tabel 3.13.
Diharapkan dengan telah dihasilkannya kebijakan dan regulasi tersebut dalam rangka peningkatan layanan pos, komunikasi dan informatika dapat memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan di bidang pos, komunikasi dan informatika.

Disamping itu, dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 merupakan kinerja yang optimal dari peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya untuk penyusunan regulasi sesuai dengan kebutuhan sebagai payung hukum pelaksanaan pelayanan pos, komunikasi dan informatika.

2.2 Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) (IK2.2)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase (%) kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika	100 %	100%	100 %

Tabel 3.13 Persentase capaian kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika yang ditetapkan

Kebijakan/Regulasi	2011	2012	2013	2014
Peraturan Pemerintah	0	1	1	0
Peraturan Menteri	26	44	33	42

Tabel 3.14 Realisasi kebijakan dan regulasi yang dihasilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011—2014

2.1 Prosentase kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika yang ditetapkan (IK2.1)

Penyelesaian kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika yang ditetapkan diukur dari seberapa banyak kebijakan dan regulasi yang telah disusun dibandingkan dengan total kebutuhan

Integrasi instansi pemerintah melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) diukur dari seberapa banyak instansi pemerintah yang telah terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) dibandingkan dengan total rencana instansi pemerintah yang akan di integrasi sesuai dengan perencanaan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB)	9 instansi	9 instansi	100 %

Tabel 3.15 Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) Tahun 2014

Dari tabel di atas, pada tahun 2014 diperoleh capaian 9 instansi dari target 9 instansi pemerintah yang akan diintegrasikan. Jadi, jumlah kumulatif di tahun 2014 adalah sebanyak 42 instansi pemerintah yang telah terintegrasi melalui PNS Box dan GSB. Untuk pencapaian target Indikator Kinerja jumlah instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) tahun 2011—2014 terlihat pada Tabel 3.16.

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pada tahun 2014 aplikasi MANTRA telah digunakan sebagai GSB untuk berbagi pakai data wajib pajak (dalam rangka memfasilitasi PMK No. 95/PMK.03/2013 dan No.132/PMK.03/2013) antara Sistem Elektronik Ditjen Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PDSI Kemenkominfo dan DPKD Prov. Sumatera Barat.

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB)	30	5	24	33	42

Tabel 3.16 Target dan realisasi Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB)

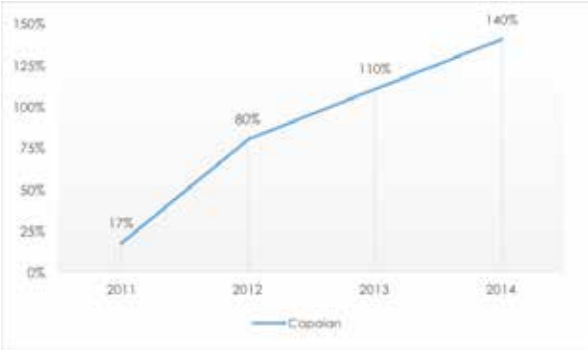

Gambar 3.9 Instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) Tahun 2011—2014

Dari Gambar 3.9 pertumbuhan instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Government Service Bus (GSB) dari tahun 2011 hingga tahun 2014 telah tercapai 140% yang meliputi 42 instansi pemerintah. Penambahan sembilan instansi pada tahun 2014 terdiri dari Kemsetneg, Pemkot Pekalongan, Pemkot Bontang, Pemkab Cirebon, Pemkot Padang Panjang, Pemprov Lampung, Pemprov Gorontalo, Pemkab Rokanhulu, dan Pemkab Maros.

Hasil capaian tersebut tidak lepas dari peran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menyediakan aplikasi untuk berbagi pakai data antar sistem elektronik dengan nama Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data (MANTRA) yang berbasis teknologi Government Service Bus. Aplikasi MANTRA merupakan layanan berbagi pakai data/ informasi yang menerapkan metode interoperabilitas antar sistem elektronik sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dan dilandasi oleh Peraturan

3. Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI (S1.3)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU dengan masing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Prosentase konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial (IK3.1)

Prosentase konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial diukur dari banyaknya konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan pemerintah daerah dan lembaga sosial dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah tercapai realisasi sebesar 100% dari target 100% pada tahun 2014. Pencapaian target IKU tersebut dilakukan melalui aktivitas pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan lainnya (termasuk media literasi dan jurnalisme warga) serta penyusunan Kebijakan, Regulasi dan Standarisasi di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Penjelasan pencapaian target atas konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial terlihat pada Gambar 3.10 di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.17 Persentase capaian konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial

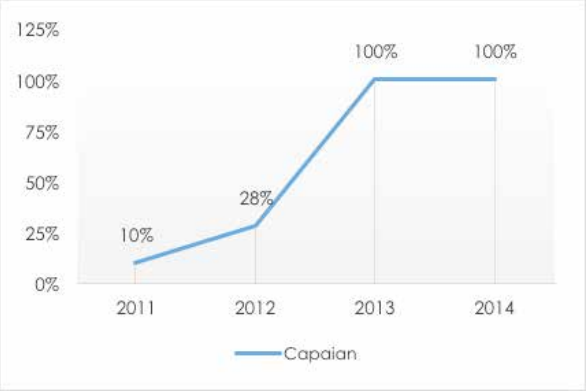

Gambar 3.10 Konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial

Dari Gambar 3.10 menunjukkan peningkatan kinerja dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mengelola konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial. Hal itu tidak lepas dari adanya aktivitas pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan lainnya (termasuk media literasi dan jurnalisme warga) serta penyusunan kebijakan, regulasi, dan standarisasi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Real-isasi	Target	Real-isasi	Target	Real-isasi	Target	Real-isasi
Jumlah aktivitas pengem-bangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan lainn-ya (termasuk media literasi dan citizen journalism)	5 kali	1 kali	7 kali	4 kali	5 kali	5 kali	9 lapo-ran	9 lapo-ran
Jumlah Kebijakan, Regulasi dan Standarisasi di bidang Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	-	-	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok

Tabel 3.18 Kegiatan yang mendukung konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial

Peningkatan aktivitas pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan berdampak pada meningkatnya keahlian masyarakat dalam menulis berita sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik dan benar.

Di era informasi seperti sekarang ini, jurnalisme warga dan media merupakan elemen untuk mewujudkan masyarakat informasi. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengembangan dan pemberdayaan pada lembaga komunikasi sosial dan kemasyarakatan dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang media literasi dan jurnalisme warga. Di tengah banjirnya informasi, masyarakat yang melek media mutlak dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Di samping itu, partisipasi publik melalui penyebaran informasi seperti jurnalisme warga menjadi kanal komunikasi baru yang memungkinkan partisipasi masyarakat bersifat spontan dan interaktif. Dengan demikian, penyebaran informasi tentang melek media dan jurnalisme warga akan membuat kesadaran masyarakat semakin meningkat di tengah derasnya arus informasi yang datang.

Pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil menyelesaikan tiga dokumen kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang informasi dan komunikasi Publik. Jumlah tersebut sesuai dengan target. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya:

1. peraturan terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH);
2. merevisi PM Kominfo No. 18/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar JFPH menjadi RPM Kominfo tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan JFPH; dan
3. cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi.

3.2 Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel (IK3.2)

Penyelesaian fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel diukur dari seberapa banyaknya fasilitasi penyebaran informasi publik yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana pelaksanaan fasilitasi penyebaran informasi publik.
Fasilitasi penyebaran informasi publik dilakukan melalui:

1. pembangunan media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di Provinsi/Kabupaten/ Kota di daerah terluar/ Terdepan/ Pasca Konflik
2. media center yang diperkuat di provinsi/ kabupaten/kota
3. penyediaan Mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika) Roda 4 dan Roda 2 untuk daerah di daerah terluar/ terdepan/pasca konflik

Pencapaian target kumulatif untuk indikator kinerja fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel dari tahun 2011—2014 ter-lihat pada Tabel 3.21 di bawah ini.

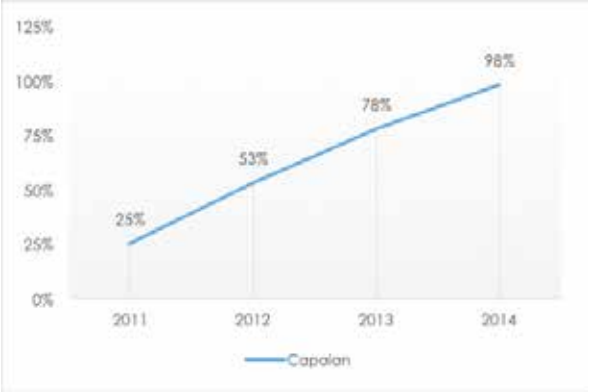

Gambar 3.11 Fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel

pemotongan anggaran, sehingga penguatan media center dan penyediaan M-Pustika tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Komunikasi publik memegang peran penting di tengah dinamika globalisasi dan demokratisasi dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel	100 %	98%

Tabel 3.19 Persentase capaian fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Pembangunan media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/ kabupaten/kota di daerah terluar/ terdepan/pascakonflik	70 lokasi	15 lokasi	30 lokasi	50 lokasi	75 Lokasi
Jumlah Media Center yang diperkuat di provinsi/ kabupaten/ kota	60 lokasi	20 lokasi	40 lokasi	55 lokasi	65 Lokasi
Jumlah M-Pustika Roda 4 dan Roda 2 untuk daerah di daerah terluar/ terdepan/ pascakonflik	100 unit	20 unit	50 unit	70 unit	80 unit

Tabel 3.20 Target dan realisasi fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel

Penjelasan pencapaian target fasilitasi penyebaran informasi publik tampak pada Gambar 3.11 di bawah ini.

Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja pada tahun 2014 tercapai sebesar 98%. Pencapaian kinerja kurang maksimal karena adanya

masyarakat, membentuk opini, dan menjaring aspirasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketersediaan informasi dan kebebasan untuk memperoleh informasi yang memadai bagi publik merupakan hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yakni transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun Pusat media yang mencakup daerah terluar, terdepan, dan daerah pasca konflik yang merupakan upaya dalam penyebaran, pemerataan, dan penyerapan informasi publik ke masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah yang berdampak putusnya jalur kerja sama, koordinasi, dan jaringan kerja teknis operasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat menyulitkan pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program- untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya membangun jalur komunikasi dan kerja operasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar kebijakan pemerintah pusat dapat dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kemudian diteruskan kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan mobil pusat teknologi informasi dan komunitas (M-Pustika) sebagai salah satu pendukung pertukaran informasi antara instansi pusat dan daerah secara tepat, cepat, dan akurat. Kehadiran M-Pustika ditujukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap berbagai masalah pembangunan dan kebijakan pemerintah. Hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah agar setiap warga negara mendapatkan informasi tentang kebijakan lembaga-negara lainnya secara tepat, cepat, dan akurat.

3.3 Prosentase data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder (IK3.3)

Prosentase data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder diukur dari target rencana yang terdapat dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010—2014.

Penjelasan pencapaian target penyediaan data dan informasi sebagaimana Tabel 3.23 di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder	100%	96%

Tabel 3.21 Persentase capaian data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		% Capaian 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah kegiatan kemitraan (stakeholder/Jaringan) layanan informasi internasional dengan lembaga-lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing dan masyarakat indonesia di luar negeri	5 paket	4 paket	5 paket	5 paket	11 keg	11 keg	13 keg	12 keg	92%
Jumlah Aktivitas Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik melalui media tercetak, online, luar ruang, dan audio visual	-	-	-	-	35 Dokumen (Cetak), 365 Kegiatan (Online), 12 Kegiatan (Audio Visual)	35 Dokumen (Cetak), 365 Kegiatan (Online), 12 Kegiatan (Audio Visual)	46 Dokumen, 365 Kegiatan (online), 12 Kegiatan (Audio Visual)	46 Dokumen, 365 Kegiatan (online), 12 Kegiatan (Audio Visual)	100%

Tabel 3.22 Target dan realisasi data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder

Data tersebut menunjukkan bahwa telah terealisasi sebesar 96% dari target 100%. Capaian tersebut sedikit berada di bawah target 100% karena adanya kebijakan pemotongan anggaran sehingga capaian sedikit berada di bawah target yang ditetapkan. Data dan informasi yang dikelola dan yang diakses oleh stakeholder disediakan dengan melakukan kemitraan (stakeholder/Jaringan) layanan informasi internasional dengan lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing dan masyarakat indonesia di luar negeri serta pengelolaan dan penyebaran informasi publik melalui media tercetak, online, luar ruang, dan audiovisual.

Pencapaian target penyediaan data dan informasi merupakan keberhasilan bersama dengan pemangku kepentingan melalui kerja sama. Kerja sama itu menjadi kunci bagaimana informasi pemerintah dapat disebar (diseminasi) secara luas. Aktivitas pengelolaan dan penyebaran informasi publik dilakukan melalui beberapa media. Pertama, media cetak di antaranya dengan menerbitkan tabloid komunika yang disebarkan ke daerah secara rutin 2 minggu sekali. Kedua, melalui media daring, yaitu website infopublik.org. Website berisi informasi publik dan berita yang diperoleh dari daerah. Ketiga, melalui media audio visual, yaitu melalui pembuatan dan penayangan PSA televisi dan penyiarannya di radio dengan tema yang berkaitan dengan isu strategis antara lain: pemilu, subsidi bbm, narkoba, dan antikorupsi. Keempat, melaui pemanfaatan media luar ruang. Seperti kain rentang, baliho, dan billboard. Aktivitas komunikasi ke masyarakat menggunakan metode ATL (above the line) yang dikombinasikan dengan BTL (below the line) menunjukkan bahwa penyediaan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di berbagai tempat dan di perbatasan.

Sementara capaian aktivitas kemitraan (pemangku kepentingan/jaringan) layanan informasi internasional dengan lembaga media asing, kantor berita, perwakilan negara asing, organisasi lembaga internasional, masyarakat asing, dan masyarakat indonesia di luar negeri pada tahun 2014, antara lain, berupa:

a. kemitraan dengan KJRI Hong Kong, KPUD Jakarta, Bawaslu, Organisasi TKW di Hongkong dan Dompet Dhuafa dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum 2014 bagi masyarakat Indonesia di Hong Kong;
b. kerja sama dengan ABU dengan bekerjasama menyelenggarakan Media Summit on Climate Change, ICTs and Disaster Risk Reduction (4-6 Juni); dan
c. kerja sama dengan UNICEF dalam penyelenggaraan Global Media Forum di Bali pada 25—28 Agustus 2014.

4. Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal (S2.1)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU dengan pencapaiannya masing-masing sebagai berikut:

4.1 Prosentase (%) utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio (IK4.1)

Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio diukur dari banyaknya spektrum frekuensi radio yang dimanfaatkan dibandingkan dengan jumlah seluruh utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010—2014.
Pencapaian Indikator Kinerja utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio tahun 2013—2014 terlihat pada Gambar 3.12.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio	100 %	100%	100 %

Tabel 3.23 Persentase capaian utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio tahun 2014

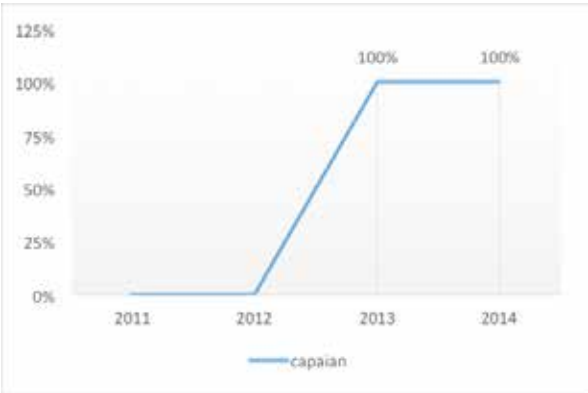

Gambar 3.12 Utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sangat bergantung pada nilai ekonomis suatu wilayah dan ketertarikan investor. Diharapkan dengan tercapainya indikator kinerja utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio akan lebih tepat dan dapat memberikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Pencapaian target sampai dengan tahun 2014 merupakan keberhasilan optimal dari peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio, karena berdasarkan data pada Gambar 3.12 dan jika dibandingkan dengan tahun 2013, prosentase utilitas tahun 2014 terus meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh perbandingan data tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Dampaknya bagi masyarakat, terutama bagi investor yang ingin bekerja menggunakan frekuensi radio, tingkat utilitas pemanfaatan frekuensi spektrum radio yang tinggi membawa pesan bahwa manfaat investasi dapat dicapai secara optimal. Dengan prosentase utilitas yang meningkat setiap tahun, masyarakat juga akan memperoleh manfaat spektrum radio yang juga optimal.

4.2 Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit (IK4.2)

Prosentase (%) pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal melalui pengelolaan/ penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit diukur dari banyaknya pengalokasian spektrum frekuensi dan jumlah slot orbit yang dimanfaatkan dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja 2014 dan Renstra 2010—2014.

Data tersebut menunjukkan bahwa telah tercapai realisasi pencapaian IKU persentase (%) pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal melalui pengelolaan/penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit sebesar 88% dari target 100% yang ditetapkan. Pencapaian itu dilakukan melalui:

1. penataan pita frekuensi radio,
2. Prosentase alokasi frekuensi untuk migrasi implementasi tv digital
3. pemanfaatan slot orbit.

Pencapaian sepanjang tahun 2011—2014 adalah seperti yang digambarkan pada Tabel 3.26 dan Gambar 3.13.

Penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit sangat bergantung pada nilai ekonomis suatu wilayah dan ketertarikan investor. Dengan demikian, diharapkan dengan meningkatnya utlititas yang tersedia maka pemanfaatan spektrum frekuensi radio akan lebih memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase (%) penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit	100 %	88,3%

Tabel 3.24 Persentase capaian penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		% Capaian 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Prosentase penataan pita frekuensi radio	-	-	-	-	95%	98%	95%	95%	100%
Prosentase alokasi frekuensi untuk migrasi implementasi tv digital	-	-	-	-	60%	60%	70%	70%	100%
Prosentase pemanfaatan slot orbit	-	-	-	-	95%	88%	95%	88%	93%

Tabel 3.25 Target dan realisasi penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit

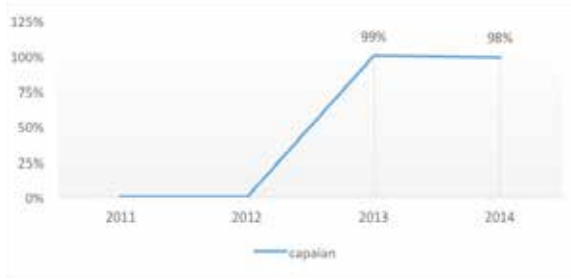

Gambar 3.13 Penataan pita frekuensi radio dan Pemanfaatan Slot Orbit Satelit

Pencapaian target sampai dengan tahun 2014 merupakan keberhasilan optimal peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit. Berdasarkan data pada Gambar 3.13 jika dibandingkan dengan tahun 2014, pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal melalui pengelolaan/penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit tahun 2014 terus meningkat. Hal itu ditunjukkan oleh perbandingan data tahun 2013 dan 2014.

4.3 Prosentase pencapaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika

Prosentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika diukur dari banyaknya PNBP yang diterima dibandingkan dengan target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014.
Data tersebut menunjukkan bahwa telah tercapai realisasi sebesar 122% dari target 100% untuk pencapaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pencapaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terbesar antara lain berasal dari biaya hak penggunaan frekuensi radio, dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi.

Penjelasan pencapaian target IKU dalam rangka mendukung pencapaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika ditampilkan pada Tabel 3.28 dan Gambar 3.14.
Sebagaimana Gambar 3.14, untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor komunikasi dan informatika.

Dari tabel 3.27 juga dapat disimpulkan sejak 2011—2014, PNBP selalu melebihi target yang ditentukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya keras untuk dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal sehingga dengan meningkatnya pencapaian PNBP menjadikan pendapatan negara bertambah.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase pencapaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika	100 %	122 %

Tabel 3.26 Persentase capaian target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2011	10.700.625.933.806,000	11.232.344.541.651,000	105%
2012	11.096.432.485.154,000	11.585.220.768.539,900	104%
2013	12.250.000.000.000,000	13.653.808.155.082,800	111%
2014	13.000.000.000.000,000	15.920.338.305.030,10	122%

Tabel 3.27 Capaian Target PNBP dari Tahun 2011—2014

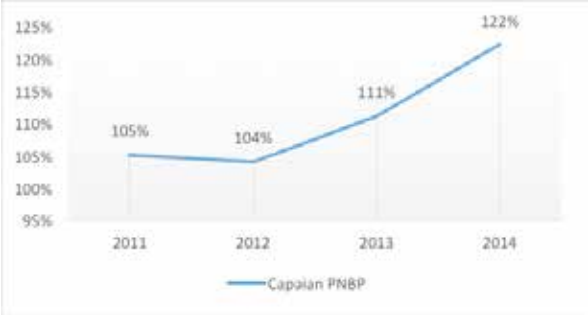

Gambar 3.14 Target PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pos, komunikasi dan informatika

5. Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (S2.2)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan empat IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU dengan pencapaian masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos	100 %	35%

Tabel 3.28 Persentase capaian penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tahun 2014

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		% Capaian 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%	35%

Tabel 3.29 Penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos

5.1 Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (IK5.1)

Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos diukur dari kemajuan proses penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut dibandingkan dengan target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014 dan Renstra 2010—2014.

Pencapaian target penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Tabel 3.29.

Berdasarkan Tabel 3.29, realisasi tahun 2014 sebesar 35% dari target 100% yang telah ditetapkan. Tidak berhasilnya capaian tersebut karena adanya kebijakan untuk merevisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, dan beberapa rancangan Peraturan Menteri yang ternyata tidak diamanatkan di Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013.

Dari target 9 peraturan yang harus ditetapkan pada tahun 2014, satu peraturan sudah ditetapkan berupa Peraturan Menteri Kominfo No. 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggara Pos. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah berhasil menyusun 9 Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan Tata Cara Penghitungan Tarif LPU, Interkoneksi Penyelenggara Pos, Metode dan Penyiapan Dokumen Seleksi Pelaksanaan LPU dan Standar Pelayanan Layanan Pos Universal dan prosedur operasional standarnya (POS).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagai pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Pos, hingga tahun 2014 telah disusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan perincian sebagai berikut.

Tahun 2011 :

1. Tersusunnya draf Rencana Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos sampai dengan harmonisasinya di Kementerian Hukum dan HAM.

Tahun 2012 :

1. Penyempurnaan draf Rencana Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos hasil harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM serta K/L terkait lainnya dan tersusunnya Permen tentang Penyelenggaraan Pos.
2. Ditetapkannya Peraturan Menteri dan Informatika No. 01/PER/M. KOMINFO/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2012 tentang Prangko.

Tahun 2013 :

1. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
2. Ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Layanan Pos Universal
3. Ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Pos Universal.

Tahun 2014 :

1. Tersusunnya sembilan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait dengan Tata Cara Perhitungan Tarif LPU, Interkoneksi Penyelenggara Pos, Metode dan Penyiapan dokumen seleksi Pelaksanaan LPU dan Standar Pelayanan Layanan Pos Universal dan SOP nya
2. Ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara pemberian izin Penyelenggara Pos

5.2 Prosentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal (IK5.2)

Instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal diukur dengan pemeringkatan e-Government (PeGI) yang dilakukan bertahap terhadap seluruh instansi pemerintah yang menerapkan e-Government dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra 2010—2014.

PeGI juga menjadi salah satu upaya penyebarluasan informasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan peningkatan peran TIK di antara instansi pemerintah dan menjadi langkah mempermudah hubungan koordinasi dan keterpaduan implementasi pemerintahan elektronik antar instansi pemerintah.

Salah satu tolok ukur e-Government ialah penerapan secara integratif, aman, dan handal. Penerapan secara integratif, misalnya tercermin pada sistem informasi di pemerintahan provinsi/kabupaten/kota yang dapat terintegrasi, seperti melalui pelayanan satu atap yang keberadaannya kini makin digiatkan oleh pemerintah. Dengan pelayanan satu atap yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh manfaat pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal	100 %	98%

Tabel 3.30 Prosentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Nilai rata-rata e-Government nasional	3	2,3	2,3	2,3	2,3
Prosentase (%) keamanan jaringan nasional	100%	-	-	95%	100%
Instansi yang mengikuti indeks keamanan informasi (KAMI)	80	21	42	62	84

Tabel 3.31 Target dan realisasi instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal

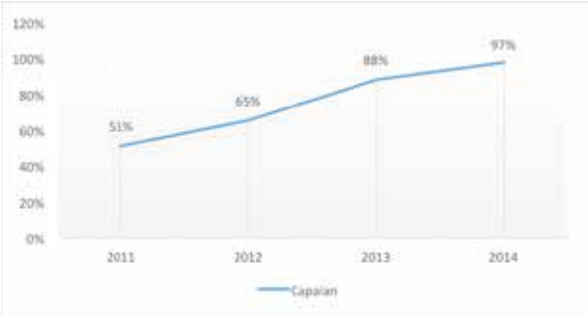

Gambar 3.15 Instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal

Pencapaian target indikator kinerja jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal ditunjukkan dalam waktu 2011—2014 dapat dilihat pada Tabel 3.31 dan Gambar 3.14 diatas.

PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK secara terarah di Instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pemeringkatan pemerintahan PeGI, yaitu:

1. menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
2. memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Berkaitan dengan keamanan jaringan nasional, khususnya pada penyelenggara jasa internet, internet exchange, lembaga pemerintahan dan critical infrastructure, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencegah, memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan serta penanganan insiden pada jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet khususnya infrastruktur strategis melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) yang merupakan sebuah tim yang bertanggung jawab kepada Menkominfo.

Dalam waktu Januari -- pertengahan Desember 2014, jumlah data serangan yang tercatat oleh sistem pemantuan mencapai 48,4 juta (data diperoleh dari 3 sensor yang dimiliki Id-SIRTII). Serangan tertinggi tercatat pada bulan Agutus dengan mencapai18 juta serangan.

Selain itu, evaluasi terhadap tingkat keseriusan intrusi ialah klasifikasi intrusi berdasarkan pada

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
4	4.7	4.6	2.4	1.2	3.4	5	18	1.5	0.91.5	1.2	0.4

Tabel 3.32 Jumlah Serangan Per Bulan (dalam satuan juta serangan)

ancaman yang akan terjadi. Berdasarkan tingkat keseriusannya, intrusi dapat dikelompokan kedalam sangat serius (high), biasa (medium), dan tidak serius (low). Dalam waktu Januari-- pertengahan Desember 2014 memiliki rata-rata tingkat keseriusan 78% (high). Tingkat keseriusan paling tinggi tercatat pada bulan Januari dengan tingkat keseriusan 95%. Tingkat keseriusan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 3.16.

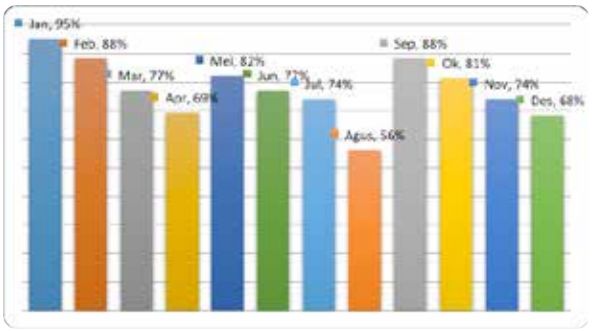

Gambar 3.16 Gambar Tingkat Keseriusan (High) Dalam Rentan Waktu Januari – Desember 2014

Data berikut adalah persentase negara yang menjadi sumber serangan. Dalam waktu Januari–Desember 2014, negara yang menjadi sumber serangan terbesar ialah Indonesia dengan persentasi terbesar dalam setiap bulan, diikuti Cina dan USA pada urutan berikutnya.

Negara	%	Negara	%	Negara	%
Jan		Feb		Mar	
ID	93%	ID	45%	ID	45%
CN	3%	CN	2%	CN	2%
US	1%	US	1%	US	2%
Apr		Mei		Jun	
ID	78%	ID	58%	ID	63%
CN	9%	CN	18%	CN	18%
US	4%	US	5%	US	5%
Jul		Agus		Sept	
ID	54%	ID	67%	ID	95%
CN	15%	CN	9%	US	3%
PK	6%	US	7%	NL	1%
Okt		Nov		Des	
ID	96%	ID	98%	ID	88%
US	2%	US	2%	US	8%
NL	1%	DE	0	NL	1%

Tabel 3.33 Tiga Besar Negara Sumber Serangan

Data berikut berupa persentase negara yang menjadi target serangan. Dalam waktu Januari--Desember 2014, negara yang menjadi sumber serangan terbesar yaitu Indonesia dengan menempati persentase terbesar dalam 6 bulan, yang diikuti oleh USA dengan 3 bulan.

Negara	%	Negara	%	Negara	%
Jan		Feb		Mar	
US	32%	JP	31%	ID	27%
JP	23%	ID	16%	US	19%
FR	9%	US	13%	SE	13%
Apr		Mei		Jun	
ID	39%	ID	43%	ID	44%
US	17%	US	13%	US	14%
DE	16%	DE	4%	IN	5%
Jul		Agus		Sept	
ID	47%	ID	36%	US	27%
US	16%	US	24%	CN	8%
KR	5%	FR	4%	MY	7%
Okt		Nov		Des	
CN	23%	US	18%		
JP	13%	JP	12%		
US	9%	CN	11%		

Tabel 3.34 Tiga Besar Negara Target Serangan

Selain itu, indikator kinerja itu dicapai melalui pemeringkatan keamanan informasi (KAMI) dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah di Indonesia yang telah menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap pengoperasiannya. Diharapkan pelaksanaan pemeringkatan KAMI dapat memberikan kontribusi yang mendasar bagi terciptanya keamanan akses informasi di setiap instansi pemerintah.

Pemeringkatan KAMI dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap indeks keamanan informasi yang datanya didapat dari pengisian aplikasi indeks keamanan informasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan lingkup pembahasan yang juga memenuhi aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009. Hasil evaluasi indeks KAMI menggambarkan tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 dan peta area tata kelola keamanan sistem informasi

di instansi pemerintah. Penilaian dalam Indeks KAMI dilakukan dengan cakupan seluruh persyaratan pengamanan yang tercantum dalam standar ISO/IEC 27001:2009, yang disusun kembali menjadi 6 (enam) area berikut.

1. Tata Kelola Keamanan Informasi.
   Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata kelola keamanan informasi beserta instansi/ fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi;
2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
   Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi;
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
   Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya;
4. Pengelolaan Aset informasi
   Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk seluruh siklus penggunaan aset tersebut;
5. Teknologi dan Keamanan Informasi
   Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi; dan
6. Peran TIK
   Bagian ini mengevaluasi tingkat kebergantungan terhadap layanan TIK untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi.

5.3 Prosentase Jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk (IK5.3)

Prosentase jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk diukur dari luasnya jangkauan TVRI dan RRI dibandingkan dengan target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra 2010-2014.

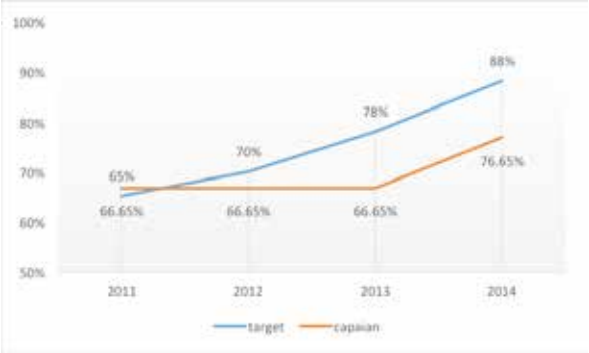

Gambar 3.17 Target dan Realisasi Jangkauan jaringan TVRI terhadap populasi penduduk

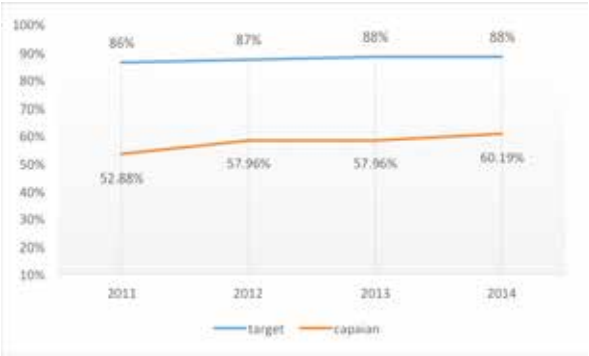

Gambar 3.18 Target dan Realisasi Jangkauan jaringan RRI terhadap populasi penduduk

Kehadiran Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menetapkan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai lembaga penyiaran publik. Ketetapan tersebut tertera pada pasal 14 (1) yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk *)	88% (TVRI), 90% (RRI)	76,56% (TVRI) 60,19% (RRI)	87% (TVRI) 67% (RRI)

Tabel 3.35 Prosentase Jangkauan jaringan TVRI dan RRI pada populasi penduduk
**) Populasi penduduk menggunakan data sensus penduduk BPS tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa*

Perkembangan jangkauan jaringan RRI dan TVRI terhadap populasi penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 digambarkan pada Gambar 3.17 dan 3.18.

penyiaran publik adalah Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Sebagai lembaga penyiaran publik sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 pasal 4 bahwa TVRI dan RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi dan tugas TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan (Mc Quil) yang dikutip oleh Darmanto dkk. 2007 bahwa siaran televisi dan radio publik setidaknya mempunyai enam fungsi yaitu:

1. media penyiaran publik menjangkau secara universal seluruh wilayah geografis;
2. menyediakan keberagaman selera, kepentingan, kebutuhan dan juga keberagaman pendapat dan kepercayaan ;
3. melayani kelompok-kelompok minoritas;
4. memberi perhatian terhadap budaya nasional, bahasa, dan identitas bangsa;
5. melayani kebutuhan system politik dengan menghargai prinsip yang berimbang, imparsial terhadap isu-isu konflik ; dan
6. media penyiaran publik memberikan perhatian khusus pada kualitas isi media.

Akan tetapi, kehadiran Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menetapkan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) mempunyai dampak terhadap pendanaan atau anggaran dari TVRI dan RRI. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 dan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN tidak mengenali LPP sebagai Badan Hukum, sehingga TVRI dan RRI selama ini mengalami kesulitan dalam dukungan APBN/APBD. Akhirnya selama ini pembiayaan LPP dianggarkan dalam pos anggaran belanja lain-lain (9909). Dengan kondisi anggaran terbatas seperti ini, upaya TVRI dan RRI untuk melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana siaran, peningkatan jangkauan siaran dan peningkatan mutu siaran menjadi sangat terbatas.

Target persentase jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi yaitu 88% untuk TVRI dan 90% untuk RRI tidak bisa dicapai dikarenakan oleh karena kondisi tersebut di atas. Walaupun begitu, ada beberapa upaya dari pemerintah untuk memperluas jangkauan siaran tersebut, seperti pembangunan proyek ITTS tahap I pada tahun 2009—2010, yaitu rehabilitasi, perbaikan, dan penggantian dengan perangkat transmisi yang baru 30 transmitter TVRI di seluruh Indonesia.

5.4 Prosentase penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi

Prosentase penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi diukur dari seberapa banyak layanan pos, komunikasi dan informatika dibandingkan dengan total keseluruhan jenis layanan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi sebagaimana Gambar 3.19 dibawah ini.

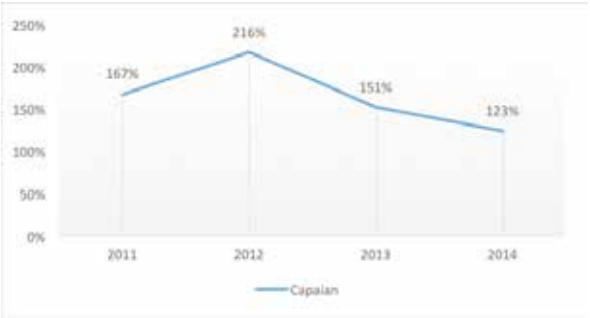

Gambar 3.19 Persentase capaian penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi

Gambar di atas menunjukkan bahwa pencapaian penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika telah tercapai melampaui target yang ditetapkan selama periode 2011—2014. Pada tahun 2012, capaian kinerja mengalami lonjakan hingga 216%. Hal ini disebabkan jumlah permohonan sertifikat operator radio mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian, apabila dibandingkan dengan tahun 2013, penyelenggaraan layanan pada tahun 2014 terlihat menurun, hal ini disebabkan penetapan target yang terlampau optimistis sehingga target yang ditetapkan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Adapun Pencapaian kinerja target IKU yang telah ditetapkan terealisasikan sebesar 123%, dengan pencapaian penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika melalui persentase:

1. tingkat kepatuhan frekuensi radio dan sertifikat perangkat telekomunikasi;
2. penanganan dan pencegahan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi yang illegal;
3. ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian;

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi	100 %	123 %

Tabel 3.36 Prosentase penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika yang professional, diselenggarakan sesuai dengan regulasi dan memiliki integritas moral yang tinggi Tahun 2014

4. availability Sistem Informasi Manajemen SDPPI;
5. berfungsinya perangkat SPFR;
6. pelayanan perizinan frekuensi radio diproses tepat waktu;
7. jumlah operator radio yang bersertifikat;
8. tingkat kepuasan pelanggan dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio;
9. sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan; dan
10. layanan pengujian perangkat informatika dan kalibrasi.

6. Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika (S2.3)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU denganmasing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

6.1 Prosentase standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika (IK6.1)

Prosentase pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran diukur dari seberapa banyak kebijakan yang mendukung standar kelayakan teknis yang dihasilkan dibandingkan dengan total kebutuhan kebijakan untuk mendukung standar kelayakan teknis yang diperlukan sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra 2010-2014.

Dari ukuran tersebut telah tercapai realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan dalam renstra. Pencapaian standar kelayakan teknis yang dihasilkan melalui penyediaan standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika.

Tabel 3.37 menunjukkan bahwa pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran telah mencapai target yang ditetapkan. Standar kelayakan teknis tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemajuan pemanfaatan teknologi perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak, sehingga standar dimaksud akan menjadi parameter perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Terlebih ketika jenis dan jumlah peralatan yang terhubung dengan komunikasi dan informatika semakin banyak dan beragam, standar yang telah ditetapkan pemerintah akan melindungi masyarakat dari peralatan yang tidak standar. Selain jaminan itu, pelaku bisnis juga akan terbantu karena dengan lolos standar maka mereka dapat menjangkau konsumen dengan mudah.

Pencapaian indikator kinerja untuk standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika dalam kurun waktu 2011—2014 dapat dilihat pada Tabel 3.38.

Diharapkan dengan pencapaian kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran akan meningkatkan kualitas dari perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang dimanfaatkan di Indonesia sertauntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian nasional.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika	100%	100%

Tabel 3.37 Prosentase standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		% Capaian 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika	10 Permen	8 Permen	8 Permen dan 2 RPM	19 Permen dan 9 RPM	5 Permen	9 Permen dan 9 RPM, dan 1 SE	10 Permen	10 Permen	100%
Jumlah dokumen Grand Design dan Road Map Penyiaran	1 dok	1 dok	1 Permen Grand Design dan Road Map Penyiaran	1 Dokumen RPM Grand Design dan Road Map Penyiaran	1 draft PP Grand Design dan Road Map Penyiaran	1 draft PP Grand Design dan Road Map Penyiaran	-	-	-

Tabel 3.38 Target dan realisasi standard dan persyaratan teknis di bidang pos dan informatika

Diharapkan dengan pencapaian kebijakan yang dihasilkan untuk mendukung standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran akan meningkatkan kualitas dari perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang dimanfaatkan di Indonesia sertauntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian nasional.

6.2 Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas (IK6.2)

Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitasdiukur dari seberapa banyak jumlah penyelenggara seluler yang patuh terhadap standar kualitasdibandingkan dengan total jumlah penyelenggara seluler yang patuh terhadap standar kualitas yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan dalam Renstra 2010-2014.

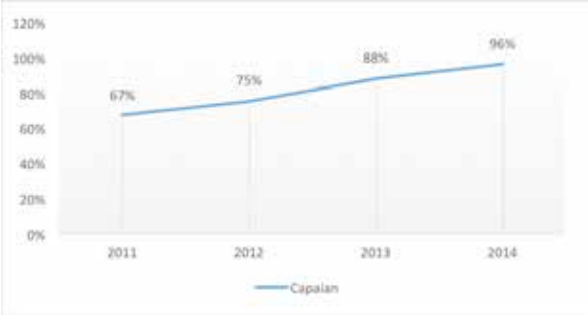

Gambar 3.20 Kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas	85%	96%

Tabel 3.39 Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas

Dari ukuran tersebut telah tercapai realisasi sebesar 96% (159 dari 166 parameter) dari target 85% yang ditetapkan. Pencapaian target IKU terkait kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M. KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular.

Standar kualitas layanan seluler diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Selular. Indikator ini dipilih dengan pertimbangan:

1. Untuk memastikan tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan.
2. Sebagai acuan pengenaan sanksi denda kepada penyelenggara yang tidak memenuhi standar pelayanan.

Pencapaian indikator kinerja prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas dapat dilihat pada Tabel 3.40 dan Gambar 3.20.
Terlihat pada Gambar 3.20 bahwa kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas yang diperoleh untuk mendukung standar kualitas penyelenggara selular secara kumulatif meningkat dari 104% pada tahun 2013 menjadi 113% pada tahun 2014. Dengan terpenuhinya standar kualitas oleh para penyelenggara seluler diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa seluler.

Terpenuhinya standar kualitas dari para penyelenggara seluler juga memberikan jaminan kepada konsumen selaku pengguna layanan. Dengan jumlah pengguna lebih dari 200 juta, jaminan layanan menjadi sangat krusial karena tidak hanya layanan teleponi dasar yang mereka gunakan tetapi juga layanan berbasis seluler lainnya.

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Prosentase kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas	85%	67%	75%	88%	96%

Tabel 3.40 Target dan realisasi kepatuhan penyelenggara seluler terhadap standar kualitas

6.3 Opini hasil audit BPK

Opini hasil audit BPKatas laporan keuangan Kementerian merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tingkat kinerja yang diharapkan dan menjadi bagian yang cukup penting dari upaya mewujudkan Good Governance. Opini diberikan berdasarkan kriteria penilaian serta standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) yang telah ditetapkan oleh BPK. Opini hasil audit tersebut terdiri dari 4 kategori, yaitu : tidak wajar (adverse opinion), Tidak Menyatakan Pendapat (No Opinion / Disclaimer), wajar dengan pengecualian (WDP), dan wajar tanpa pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan BPK.

Dari hasil audit atas laporan keuangan Kementerian TA 2013, BPK masih memberikan opini wajar dengan pengecualian(WDP) dari target WTP yang telah ditetapkan. Kondisi ini masih sama dengan kondisi tahun 2011 dan 2012 seperti terlihat pada Tabel 3.32 dibawah ini.

keuangan satuan kerja takteraudit;

b. Pendampingan oleh Inspektorat Jenderal dalam penyelesaian (penindak-lanjutan) temuan BPK atas laporan keuangan Kominfo (tingkat Eselon I);
c. Pemetaan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan BPKP untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan lemahnya pengendalian intern, khususnya di Direktorat Jenderal SDPPI dan Direktorat Jenderal PPI, termasuk di BP3TI;
d. Menyusun langkah menuju WTP oleh Inspektorat Jenderal dengan didampingi BPKP;
e. Melakukan internalisasi dan kampanye menuju opini WTP ke seluruh satker, dengan tujuan:
   1. menyamakan persepsi dan komitmen dalam mencapai opini WTP antara Itjen sebagai pengawas dengan Satker sebagai pelaksana;
   2. meminimalisasi terjadinya temuan berulang setiap tahun;

Indikator Kinerja	2011		2012		2013	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini hasil audit BPK	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP

Tabel 3.41 Opini hasil audit BPK

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2014 belum diketahui karena hingga saat disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2014, proses pemeriksaannya masih berlangsung.

Dari data tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa opini hasil audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 belum mengalami peningkatan atau tetap mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Masalah utama yang menyebabkan Laporan Keuangan (LK) Kemenkominfo dari tahun ke tahun (termasuk LK Tahun 2013) belum memperoleh opini WTP adalah adanya piutang PNBP dari BHP frekuensi dan sektor penyiaran yang tidak diketahui Wajib Bayar-nya ("no name") dalam jumlah yang dianggap cukup material. Di samping itu, terdapat juga kelemahan antara lain di dalam pengelolaan uang muka belanja dan pembayaran kepada penyedia jasa PLIK oleh BP3TI yang tidak dapat diyakini kewajarannya, serta adanya belanja barang yang tidak dapat diyakini prosesnya.

Berkaitan hal tersebut dan dalam rangka menuju WTP, telah dilakukan upaya antara lain sbb:

a. Pendampingan oleh Inspektorat Jenderal dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja (mulai dari Eselon II), serta reviu atas laporan
   3. mengatasi hambatan yang dihadapi Satker dalam pencapaian WTP serta membantu memberikan solusi yang tepat sasaran.

Selain itu, dilakukan berbagai kegiatan pengawasan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, seperti asistensi dan advokasi, yang sesuai dengan peran baru APIP sebagai "agent of Quality Assurence." Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal lebih ditujukan pada pembinaan sehingga lebih dititik beratkan pada pengawasan preventif (pencegahan) dan direktif (pengawalan) daripada bersifat reaktif/represif (tindakan). Kebijakan itu dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan terus meningkatnya kegiatan Forum Literasi Media, masyarakat lebih dapat memilah dan menilai isi media massa secara kritis, dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Media massa perlu diingatkan untuk kembali pada orientasinya semula, yaitu menyajikan pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan, tayangan yang bersifat meredam konflik serta membangun ruang publik yang sehat demi optimalisasi partisipasi semua unsur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.1)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dan pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

7.1 Prosentase (%) sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah) (IK7.1)

Prosentase (%) sekolah di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki sistem e-learning diukur dari seberapa banyak sekolah di wilayah tersebut yang telah memiliki sistem e-learning dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan dalam Renstra 2010-2014.

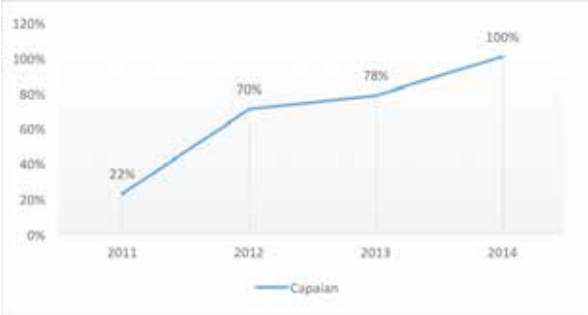

Gambar 3.21 Sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah)

sebanyak 500 sekolah di lima kab/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta kini sudah difasilitasi sistem e-learning. Penyediaan sistem e-learning pada sekolah di lima Kab/Kota di DIY dilakukan dengan menyediakan infrastruktur di 300 SD dan 200

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase (%) sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah)	100%	100%

Tabel 3.42 Persentase sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah)

Pencapaian pembangunan sistem e-learning di 500 sekolah di DIY dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2014. Hasil capaiannya seperti terlihat pada Tabel 3.44 dan Gambar 3.21, sedangkan untuk penyelesaian sesuai tahapan per tahun terlihat pada Gambar 3.43.

	2011	2012	2013	2014
Realisasi	110	240	40	110
Target	50	250	500	-

Tabel 3.43 Penyelesaian ICT Utilization Project For Educational Quality Enhacement

Tabel 3.43 merupakan target per tahun dari pembangunan sistem e-learning di 500 sekolah di DIY, sedangkan untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu 211—2014 ditunjukkan pada tabel 3.44 dan Gambar 3.21.

Berdasarkan Gambar 3.21, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil mencapai realisasi sebesar 100% sesuai target yang ditetapkan. Jadi,

SMP berupa laboratorium komputer, jaringan informasi antar sekolah, materi ajar berbasis TIK, perangkat lunak bagi pengembangan materi ajar dan peningkatan kapasitas guru untuk memberikan pembelajaran berbasis TIK. Nama resmi proyek pinjaman/hibah ini yakni ICT Utilization Project For Educational Quality Enhacement in Yogyakarta province dengan register IP-542 JIBC 21585701. Ruang lingkup pekerjaan:

1. pengadaan peralatan IT/PC untuk 500 sekolah;
2. pengembangan Sistem Internet Data Center (IDC);
3. pengadaan materi ajar; dan
4. pengadaan Jasa Konsultan.

Melalui pembangunan sistem e-learning, maka kualitas pendidikan serta pemerataan akses materi pendidikan di provinsi DIY dapat ditingkatkan dan digunakan sebagai model pemanfaatan TIK pendidikan di Indonesia.

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Prosentase (%) sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah)	500	110	350	390	500

Tabel 3.44 Target dan realisasi sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki sistem e-learning (dari total 500 sekolah)

7.2 Jumlah analisis di bidang polhukam, perekonomian dan kesra

Jumlah analisis di bidang polhukam, perekonomian dan kesra diukur dari seberapa banyak analisis yang tersedia dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/ penetapan kinerja. Pencapaian kinerja terkait analisis di bidang polhukam, perekonomian dan kesra ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Capaian analisis di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra	100 % (300 analisis)	100%	100%

Tabel 3.45 Persentase capaian Analisis di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Tahun 2014

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah analisis di bidang polhukam, perekonomian dan kesra	300 analisis	300 analisis	300 analisis	300 analisis	300 analisis	300 analisis	300 analisis	300 analisis

Tabel 3.46 Target dan Realisasi Analisis di Bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian dari target yang adalah 100% dan menghasilkan 300 analisis. Hasil analisis diserahkan kepada pimpinan untuk dijadikan bahan masukan dan rujukan pada kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat. Untuk capaian kinerja selama kurun waktu 2011—2014 dapat dilihat pada Tabel 3.46.

7.3 Jumlah Paket Informasi Publik di Bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra (IK7.3)

Jumlah paket informasi publik di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra diukur dari seberapa banyak paket informasi yang tersedia dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/ penetapan kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah paket informasi publik di bidang polhukam, perekonomian, dan kesra	100 %	100%	100 %

Tabel 3.47 Persentase jumlah paket informasi publik di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra Tahun 2014

Tabel 3.46 bahwa capaian kinerja analisis di bidang polhukam, perekonomian dan kesra dari tahun ke tahun selalu mencapai 300 analisis. Selain itu juga telah dilakukan penyusunan dokumen database nasional, sektoral, dan regional. Dokumen database nasional berisi kebijakan pemerintah di tingkat pusat, misalnya: ketahanan pangan, pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Dokumen database sektoral berisi isu-isu terkait di bidang polhukam, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dokumen database regional berisi kebijakan di tingkat daerah. Indikator lainnya adalah penyediaan konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan hasil analisis tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan berkualitas sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang ada terkait isu polhukam, perekonomian dan kesra. Konten informasi ini disebarluaskan ke daerah agar diperoleh umpan balik.

Tabel 3.47 menunjukkan bahwa untuk indikator kinerja tersebut terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Pencapaian kinerja paket informasi publik di bidang polhukam, perekonomian dan kesra dalam kurun waktu 2011—2014 dapat dilihat pada Tabel 3.48.

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah paket informasi publik di bidang Polhukam, Perekonomian dan Kesra	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket

Tabel 3.48 Target dan Realisasi Analisis di Bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra

Tampak pada tabel di atas, capaian kinerja sejak tahun 2011 s.d. 2014 selalu menghasilkan jumlah paket informasi yang ditargetkan. Paket informasi publik di bidang polhukam, perekonomian dan kesra berupa buku, CD, leaflet, pamflet, iklan layanan masyarakat, dan advertorial. Isu-isu yang dikemukakan di tahun ini antara lain adalah tentang narkoba, pemilu, kekerasan anak, tenaga kerja indonesia, bonus demografi, BPJS, dan pencapaian ekonomi di era pemerintahan saat ini.

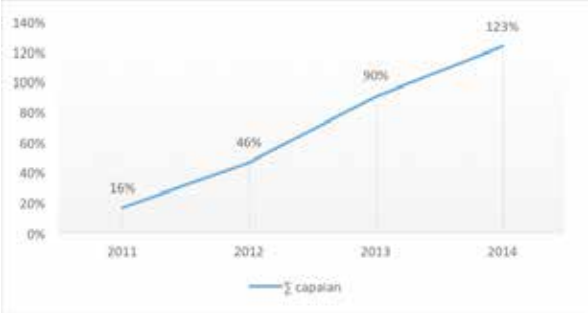

Gambar 3.22 jumlah peserta Diklat Kominfo

8. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.2)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dengan pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

8.1 Jumlah peserta diklat literasi kominfo (IK8.1)

Indikator kinerja tentang jumlah peserta diklat literasi kominfo diukur dari seberapa banyak peserta diklat literasi kominfo dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra 2010-2014. Untuk mencapainya dilakukan diklat literasi, pelatihan komunikasi publik, pelatihan internet sehat, pelatihan multimedia untuk UMKM, Bimtek INSAN, dan pemberdayaan Relawan TIK.

Terlihat pada Tabel 3.48 bahwa pada tahun 2014 target kegiatan ini adalah 7.089 orang, sedangkan realisasinya sebesar 7.718 orang (109%). Pencapaian indikator kinerja jumlah peserta pendidikan dan pelatihan literasi Kemenkominfo selama kurun waktu 2011—2014 ditunjukkan pada Tabel 3.50 dan Gambar 3.22.

Gambar 3.22 menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan meningkatkan literasi masyarakat dan profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia di bidang komunikasi dan informatika. Hal tersebut dicapai melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan literasi masyarakat terhadap TIK.

Target peserta pendidikan dan pelatihan literasi dapat dicapai dengan baik dan mendapat animo yang baik dari peserta, khususnya ibu rumah tangga dan UMKM. Mereka merasakan manfaat yang besar dari pelatihan yang diberikan, terutama bagaimana memanfaatkan internet dan perangkat multimedia dalam memperoleh informasi dan meningkatkan aktivitas pemasaran usaha.

Di tengah arus informasi global, mereka bisa ikut ambil bagian dengan menyediakan informasi mengenai aktivitas usaha mereka dan cara memasarkannya melalui jalur daring. Dengan dampak positif yang dihasilkan dan respon baik dari para peserta, kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya dimana sasaran peserta difokuskan pada kalangan masyarakat yang memiliki akses terbatas dengan TIK yaitu ibu rumah tangga, UMKM, dan masyarakat disabilitas.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
jumlah peserta diklat literasi kominfo	7.089 orang	7.718 orang	109%

Tabel 3.49 Persentase jumlah peserta Diklat Kominfo Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
jumlah peserta diklat literasi kominfo	23.289 orang	3.655 orang	10.637 orang	21.033 orang	28.751 orang

Tabel 3.50 Target dan realisasi jumlah peserta Diklat Kominfo

9. Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat (S3.3)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 4 (empat) IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU denganmasing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

9.1 Jumlah Lembaga Pemerintahan/Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik (IK9.1)

Jumlah Lembaga Pemerintahan/Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik diukur dari seberapa banyak Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik dibandingkan dengan jumlah seluruh Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik baik di pusat maupun di daerah.

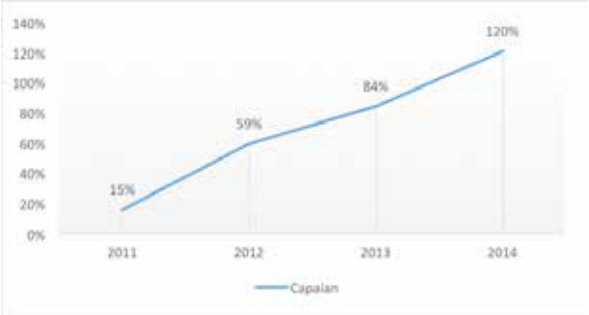

Gambar 3.23 Jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik

sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik dalam kurun waktu 2011—2014 ditunjukkan pada Tabel 3.52 dan Gambar 3.23.

Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pengejawantahan Pasal 28 F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Konsekuensi dari penerapan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik	350 Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik	339 Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik	97%

Tabel 3.51 Persentase jumlah lembaga pemerintah/badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik tahun 2014

Dari tabel diatas, dapat dilihat capaian Jumlah Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik 339 pemerintahan/ badan publik dari 350 lembaga pemerintahan/badan publik yang ditargetkan. Upaya untuk meningkatkan peran Lembaga Pemerintahan/Badan Publik sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi nasional melalui pelaksanaan advokasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Jumlah Lembaga Pemerintahan/ Badan Publik yang mampu meningkatkan perannya

Undang-Undang tersebut adalah bahwa setiap badan publik tidak boleh lagi menyembunyikan beragam informasi publik kepada warga negara yang membutuhkannya kecuali kategori informasi yang dirahasiakan.

Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 akan mendorongkoordinasidankomunikasidalamkerangka kerja mengelola data, informasi, dan dokumentasi. Setiap badan publik perlu mempersiapkan data informasi publik yang dimilikinya, agar setiap informasi publik mudah diakses masyarakat dengan cepat, tepat waktu, dan murah. Untuk itu, setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Oleh sebab itu, Kementerian Kominfo mendorong pembentukan dan peningkatan kapasitas PPID baik di tingkat pusat

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah PPID Badan Publik yang terbentuk dan beroperasi: 1. Kementerian/ Lembaga 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota	335	51	199	285	339

Tabel 3.52 Target dan realisasi jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik

dan daerah. Kecakapan PPID dalam menghimpun, mengelola, dan mempersiapkan data menjadi kunci agar pelayanan informasi publik berlangsung cepat, tepat waktu, dan murah. Pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkannya.

Khusus untuk pembentukan dan pengembangan PPID di lingkup pemerintah daerah, Kemenkominfo membangun sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (terkahir direvisi dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Jalinan sinergi tersebut agar upaya pembentukan dan pengembangan PPID di lingkup pemerintah daerah dapat berlangsung lebih efisien dan efektif.

Bagi masyarakat, keberadaan informasi publik yang transparan dan akuntabel akan membantu mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara cepat, murah, dan juga transparan. Meski dalam pelaksanaan masih ada saja celah bagi lembaga pemerintah untuk berlindung dari kewajiban informasi publik, langkah Kemenkominfo menginisiasi komunikasi publik sebagai kewajiban yang harus dipenuhi setiap lembaga negara, menjadi langkah maju untuk memperkuat pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

9.2 Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu

Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu diukur dari fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

Dari Tabel 3.53 dapat dilihat bahwa capaian tahun 2014 adalah 69%, yang dicapai dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada pada wilayah/ daerah tersebut. Secara detail capaian indikator Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu dalam priode 2011—2014 dapat dilihat pada Tabel 3.54 dan Gambar 3.23.

Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.23, capaian kinerja pada tahun 2014 adalah sebesar 69%, yaitu dengan memberdayakan organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi di 138 lokasi. Target yang ditetapkan tidak tercapai disebabkan karena ada kebijakan pemotongan anggaran.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	100%	69%

Tabel 3.53 Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas)di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Prosentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu	200 lokasi	80	120	134	138

Tabel 3.54 Target dan realisasi jumlah lembaga pemerintahan/ badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik

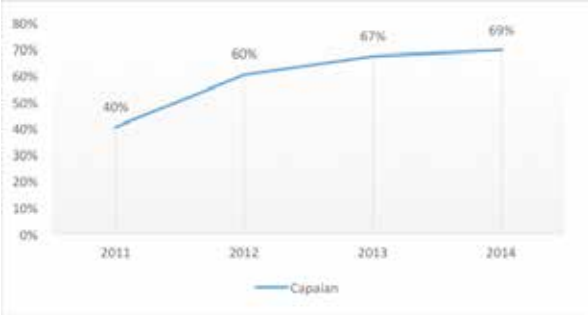

Gambar 3.24 Aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media tradisional, media komunitas)di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu

Pengembangan jaringan infrastruktur yang memadai perlu diimbangi dengan konten yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan, dan meningkatkan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, Kementerian Kominfo mendorong peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (Kelompok Informasi Masyarakat, media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Sehingga, kehadiran beragam infrastruktur telekomunikasi dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Ibarat mata uang, infrastruktur yang memadai disertai dengan konten yang disesuaikan dengan kearifan lokal akan mampu menciptakan konten yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan. Dalam kerangka NKRI, konten seperti itu akan memperkaya khasanah sebagai bangsa, tidak sekadar sebagai konten yang berjalan satu arah tanpa mempedulikan siapa yang akan mengkonsumsi konten tersebut.

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan kelanjutan dari komunitas yang di masa Orde Baru dikenal sebagai Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir). Kelompencapir pada era tersebut ikut andil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras dan mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1984.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia sejak 1998, format Kelompencapir mengalami berbagai perubahan. Kelompencapir yang sebelumnya bersifat top-down perlu menyesuaikan diri menjadi bersifat bottom-up yang disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Peran KIM secara umum meliputi:

1. mengelola informasi: mulai dari menyerap, mengumpulkan, mengolah (memilah dan memilih), menyimpan dan mendiseminasikan informasi kepada pihak yang kompeten,
2. mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi: agar menjadi insan informasi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan pembangunan, dan
3. menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah: pemerintah daerah maupun pusat memerlukan informasi tentang kebutuhan masyarakat dan tingkat perkembangannya, sehingga pembangunan yang disusun akan tepat sasaran.

Dengan menjadi anggota KIM, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk mengakses informasi, menambah informasi yang diperlukan, memperluas pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir, meningkatkan kemampuan bekerja, dan melakukan inovasi dalam usahanya yang antara lain didorong dengan adanya sentuhan teknologi dan tambahan pinjaman modal untuk memperbesar produksi dan pemasaran. Berbagai hal itu pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan anggota dan keluarga KIM.

Mengingat pentingnya peran KIM tersebut dan juga media tradisional dan media komunitas, Kementerian Kominfo terus mendorong pengembangannya di kawasan perdesaan. Kehadiran sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat semakin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pembangunan perekonomian warga masyarakat yang berada di perdesaan, terutama di daerah perbatasan dan wilayah tertinggal.

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kebutuhan informasi bagi masyarakat dapat terpenuhi dan organisasi kemasyarakatan tersebut (KIM) mampu untuk mengelola dan menyediakan informasi, mendiseminasikan informasi serta dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan.

9.3 Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi (IK9.3)

Prosentase aktifitas yang efektif untuk mendorong media literasi diukur dari seberapa banyak aktifitas yang efektif untuk mendorong media literasi dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi	100%	83%

Tabel 3.55 Prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi Tahun 2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tahun 2014 adalah 83%, tidak memenuhi target 100% yang ditetapkan. Untuk pencapaian indikator prosentase aktifitas yang efektif untuk mendorong media literasi selama periode 2011—2014 seperti ditunjukkan tabel 3.56.

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Prosentase aktifitas yang efektif untuk mendorong media literasi	5 kali	1 kali	7 kali	4 kali	3 kali	4 kali	6 dokumen	5 dokumen

Tabel 3.56 Realisasi prosentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi Tahun 2011—2014

Pencapaian target tersebut dilakukan melalui kegiatan media literasi dan citizen journalism. Forum Literasi Media membekali masyarakat dengan kemampuan untuk dapat memilah dan menilai isi media massa secara kritis, sehingga isi media tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Hal ini penting, karena di tengah himpitan motif keuntungan dan ideologis media di tanah air, konsumen sulit mengakses sajian media massa yang tidak berpihak. Sajian pers yang terkontaminasi oleh kapitalisme media mengakibatkan kesenjangan komunikasi antara pengelola lembaga media dengan publiknya. Media massa perlu diingatkan untuk kembali pada orientasinya semula, yaitu menyajikan pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan, tayangan yang bersifat meredam konflik serta membangun ruang publik yang sehat demi optimalisasi partisipasi semua unsur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Forum Literasi Media meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemanfaatan media secara sehat, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap konten media yang tidak memenuhi unsur pendidikan dan pencerahan, serta mewujudkan sinergi dan interaksi yang konstruktif dan kontinyu antara masyarakat dengan media terkait pengawasan konten media.

Apabila masyarakat "melek" media, mereka dengan mudah memilah dan memilih informasi yang dirasakannya jujur, obyektif, dan tidak berpihak sehingga mereka akan menjadi pengkonsumsi media yang cerdas. Melek media menjadi faktor amat penting bagi sebuah bangsa karena kegaduhan kerap kali terjadi saat media yang bias dan partisan melakukan hegemoni terhadap kebenaran. Di sanalah kebutuhan akan literasi media yang baik sehingga masyarakat tidak terjebak dalam stigma yang dihembuskan oleh media, sekalipun itu media aras utama.

Dengan terus meningkatnya kegiatan Forum Literasi Media, masyarakat lebih dapat memilah dan menilai isi media massa secara kritis, dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Media massa perlu diingatkan untuk kembali pada orientasinya semula, yaitu menyajikan pemberitaan yang mendidik dan mencerahkan, tayangan yang bersifat meredam konflik serta membangun ruang publik yang sehat demi optimalisasi partisipasi semua unsur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

9.4 Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik (IK9.4)

Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik diukur dari seberapa banyak aktifitas penguatan lembaga/media publik dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010-2014.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah aktivitas penguatan lembaga/ media publik	100 %	100%	100%

Tabel 3.57 Prosentase Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media public Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah aktivitas verifikasi dan Monev PSO ANTARA	32 lokasi	8 lokasi	16 lokasi	24 lokasi	32 lokasi

Tabel 3.58 Target dan realisasi jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian untuk tahun 2014 adalah 100% dari target 100% yang ditetapkan. Pencapaian indikator tersebut dilakukan dengan melakukan verifikasi, memantau serta mengevaluasi Public Service Obligation (PSO)/ Kewajiban Pelayanan Publik bidang pers melalui Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA. Pelaksanaan verifikasi dan monitoring dilaksanakan dalam kurun waktu 2011—2014 dengan capaian seperti Tabel 3.58 dan gambar 3.24 berikut ini:

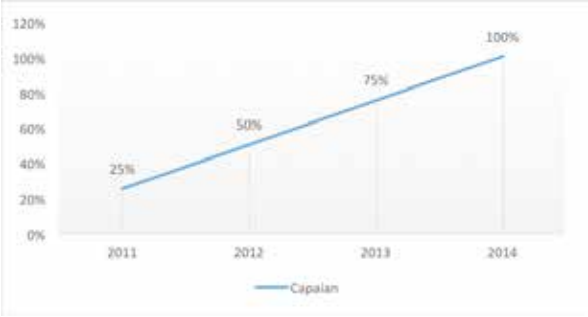

Gambar 3.25 Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Perum tersebut melalui PSO, meliputi : (a) peliputan dan/ atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional; (b) penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, gambar, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan. Atas dasar ketentuan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, menugaskan Perum LKBN ANTARA dalam kerangka Kewajiban Umum/Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers.

Penyajian berita bertema PSO Bidang Pers merupakan salah satu konsekuensi dari Perum LKBN ANTARA, yang sejak tahun 2008 mendapat dana penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (PSO) Bidang Pers dari pemerintah. Sampai dengan tahun 2014 ini, PSO Bidang Pers Perum LKBN ANTARA dilaksanakan dengan progress yang terus dikembangkan dalam upaya mendiseminasikan produk-produk berita PSO Bidang Pers agar dapat bermanfaat dan sampai kepada masyarakat.

Beberapa pencapaian dalam mengimplementasikan produk-produk PSO Bidang Pers LKBN ANTARA Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:

1. Produk Teks
   Berupa berita tertulis yang disebarluaskan Antara melalui jaringan satelit dan web kepada para pelanggan dan publik secara luas termasuk dalam bentuk cetak berjumlah 148.000 berita.
2. Produk Foto
   Adalah obyek fotografi yang bernilai berita kepada media massa pelanggan yang pada akhirnya akan disebarluaskan kepada masyarakat secara luas termasuk dalam bentuk cetak berjumlah 17.000 berita.
3. Produk Televisi Hardnews dan Features
   Produk audio visual berbentuk features/ dokumenter dan hardnews, yang disebarluaskan dan ditayangkan melalui media penyiaran (stasiun-stasiun TV), cakram DVD dan website. Produk ini ditayangkan melalui kerjasama dengan beberapa stasiun TV lokal dan/atau nasional. Untuk TV Feature sebanyak 45 episode dan TV Hardnews sebanyak 4,124 berita.

Hasil yang diterima oleh publik berupa penyediaan layanan informasi yang membawa misi meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dengan mensosialisasikan kebijakan publik kepada masyarakat serta menumbuhkan interaksi yang sehat dalam proses penyusunan kebijakan dimaksud agar dapat dihasilkan output terbaik serta membina masyarakat agar dapat memberi kontribusi dan partisipasi dalam memberikan informasi (citizen journalism) sehingga menimbulkan kedekatan antara konten dengan subyek dan obyeknya.

10. Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air (S3.4)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dan pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

10.1 Persentase aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI) (IK10.1)

Persentase aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI) dari aktivitas kemitraan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan target aktivitas kemitraan yang direncanakan sesuai target dalam perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase (%) aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI)	100 %	100%	100 %

Tabel 3.59 Persentase aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI) Tahun 2014

Dari Tabel 3.59, terlihat bahwa capaian untuk Tahun 2014 adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini dilakukan melalui kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga penyiaran publik, fasilitasi melalui bakohumas, lembaga pemerintah dan dunia usaha. Pencapaian indikator Jumlah aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI) dalam kurun waktu 2011—2014 seperti ditunjukkan Tabel 3.60.

aktual dan akuran. Juga memberi ruang kepada semua pihak untuk berperan. Sebaliknya, pemangku kepentingan juga dapat memberikan informasi tentang pelbagai hal sehingga komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatoris dapat tercapai dengan mudah.

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		% Capaian 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI)	96 laporan	94 laporan	102 laporan	117 laporan	132 laporan	132 laporan	155 laporan	155 laporan	100%

Tabel 3.60 Target dan realisasi aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media (termasuk LPP TVRI dan RRI)

Aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta, dan media dilaksanakan melalui Bakohumas sebagai wadah koordinasi humas-humas pemerintah baik pusat maupun daerah memandang perlu untuk memanfaatkan media internet sebagai salah satu upaya dalam menjalin komunikasi maupun sebagai sarana penyebaran informasi.

Website Bakohumas dapat menjadi rujukan bagi humas-humas pemerintah dan lembaga lainnya dalam mencari informasi mengenai kebijakan yang terkait dengan kehumasan serta informasi positif lainnya. Pengelolaan Website dilakukan oleh Sekretariat Bakohumas sehingga informasi yang sajikan dapat diakses dengan mudah, up to date, dan pada akhirnya bisa bermanfaat bagi para penggunanya. Sekretariat juga menyelenggarakan pertemuan tingkat regional (3 kali) dan nasional (1 kali).

Pelaksanaan kegiatan ini juga direalisasikan dalam bentuk diseminasi informasi melalui dialog interaktif di media televisi berupa: talk show, tanya jawab melalui telepon dan running text. Metode siaran ada juga yang berupa pemaparan materi oleh narasumber serta menjawab pertanyaan pemirsa melalui telepon.

Tujuan dari program ini antara lain: mensosialisasikan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dan berbagai fenomena sosial kemasyarakatan yang sedang terjadi; memberikan pelayanan informasi publik yang benar terhadap isu negatif yang simpang-siur dan menyesatkan yang beredar dimasyarakat; serta untuk mengetahui dan menyerap aspirasi masyarakat terhadap kebijakan maupun fenomena yang terjadi. Melalui aktivitas kemitraan ini, informasi yang diterima oleh masyarakat dapat mudah dipahami,

11. Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika (S4.1)

Adalah sangat penting melandaskan suatu kebijakan pemerintah berdasarkan hasil riset dan/ kajian sehingga kebijakan tersebut memiliki pondasi kontekstual yang kokoh untuk menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya menumbuhkembangkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang kominfo. Indikator utama dari sasaran strategis ini adalah jumlah pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil penelitian di bidang kominfo.

Penelitian yang bermanfaat perlu didiseminasikan secara luas. Pentingnya publisitas inilah yang membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika mematok target yang maksimal untuk publikasi hasil litbang disertai dengan perencanaan dan eksekusi yang matang sehingga target litbang bisa teralisasi dengan baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU dengan masing-masing pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

11.1 Prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika (IK11.1)

Prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika diukur dari jumlah karya riset yang dihasilkan dan dijadikan acuan penyusunan

kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika dibandingkan dengan total karya riset yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010—2014.

Target pencapaian kinerja dari indikator tersebut di tahun 2014 adalah 40% dari karya riset yang dipublikasikan menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika. Jumlah karya riset yang dipublikasikan pada tahun 2014 adalah sejumlah 21 laporan, dan seluruhnya dapat digunakan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan. Pencapaian indikator ini dalam kurun waktu 2011—2014 adalah seperti pada Tabel 3.62 dan Gambar 3.25.
Terlihat pada grafik di atas, bahwa pencapaian target

makalah kebijakan bidang komunikasi dan informasi. Di samping itu yang menjadi perhatian utama dari framework penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah diseminasi informasi baik melalui jurnal penelitian mapun melalui media lainnya. Berikut antara lain topik penelitian yang diselesaikan di TA 2014:

1. Studi Pemetaan Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler Indonesia
2. Analisis Kebutuhan Spektrum Frekuensi PPDR Pita Lebar di Indonesia
3. Analisis Tekno-Ekonomi Implementasi Teknologi LTE 1.8GHz bagi Operator Seluler di Indonesia
4. Peran Sektor TIK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika	40% (dari karya riset yang dipub-likasikan)	100%

Tabel 3.61 Persentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah karya litbang yang dipublikasikan	204 laporan	76 laporan	130 laporan	183 laporan	204 laporan

Tabel 3.62 Target dan realisasi karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika

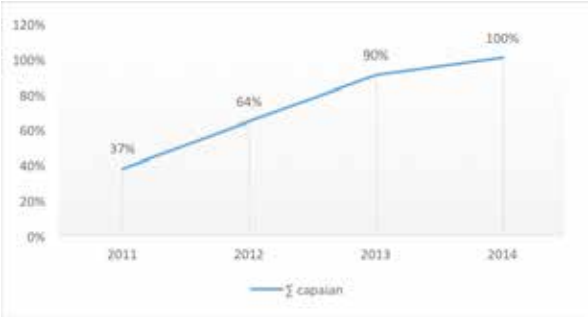

Gambar 3.26 Karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika

kinerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 melampaui target yang seharusnya (dari 20 jumlah karya litbang yang dipublikasikan capaiannya mencapai 21 karya yang dipublikasikan atau 105 persen). Karya penelitian dan pengembangan ini mendukung upaya penciptaan kebijakan berbasis riset dan hasil yang diperoleh telah disampaikan sebagai bentuk rekomendasi kepada unit kerja untuk menjadi input bagi penyusunan kebijakan, baik yang bersifat rencana kebijakan (pro-active analysis) maupun evaluasi kebijakan.
Titik berat dari riset Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pada kajian kebijakan dan/atau

5. Penelitian Kajian Tentang Urgensi Perlidungan data Pribadi bagi Pengguna Akses Informasi
6. Kajian tentang Konsolidasi Industri Telekomunikasi
7. Kajian Skema Strategi Pembangunan dan Aspek Pembiayaan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia (Kajian Implementasi USO Di Indonesia dan Konsep Ideal Tata kelola Serta Pengembangannya)
8. Joint Research: Efektivitas Penyelenggaraan Layanan Pos Universal / LPU (Analisis Deskriptif Kualitatif Penyelenggaraan LPU di Kota Bandung)
9. Studi Pengembangan Database SDM TIK di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Kajian Pasokan (Supply) dan Permintaan (Demand) SDM TIK di Bidang Industri

Untuk mengukur indikator prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika, pada bulan Maret-April 2014, dilakukan survei terhadap 64 unit kerja eselon II dan III mengenai persepsi satuan kerja di Kementerian Kominfo terhadap hasil penelitian dan pengembangan Balitbang SDM. Hasil survei menunjukkan bahwa 61% responden menyetujui

bahwa hasil penelitian dan pengembangan mereka sudah manfaatkan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan satuan kerja mereka. Dari segi kuantitas, jumlah karya riset yang telah dilaksanakan telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dimana hasil riset telah disampaikan sebagai rekomendasi dan masukan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Sedangkan dari segi kualitas, hasil survei persepsi responden tentang hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada lingkungan internal Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap penelitian dan pengembangan yang dilakukan berada pada range cukup baik. Hasil survei menunjukkan hasil dari penelitian dapat dipercaya sebagai sumber referensi dan informasi serta memberikan peran dalam membuat kebijakan-kebijakan di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Dengan demikian, prosentase karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika telah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan, pada tahun 2014, selain menyelenggarakan penelitan tim, Kementerian Kominfo juga melakukan beberapa joint research dengan universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Dengan metode ini diharapkan tercipta knowledge sharing yang semakin kuat di antara peneliti sehingga secara langsung memperbaiki kualitas hasil penelitian.

11.2 Jumlah pemanfaatan karya riset bidang komunikasi dan informatika untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo (IK11.2)

Indikator tentang jumlah pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo diukur dari seberapa banyak karya riset bidang literasi dan profesi yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra 2010—2014.

Seperti terlihat pada Tabel 3.63, bahwa capaian untuk Tahun 2014 adalah 160%, dengan direalisasikannya 8 dokumen karya riset yang dimanfaatkan untuk kemajuan bidang komunikasi dan informatika.

Adapun karya riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan/regulasi dicapai melalui penerbitan hasil penelitian dalam jurnal/bulletin/berkala ilmiah. Dengan diterbitkan dan didistribusikannya hasil penelitian dalam jurnal/buletin/berkala ilmiah diasumsikan bahwa penelitian tersebut dimanfaatkan. Di samping itu untuk meningkatkan pemanfaatan karya riset bidang komunikasi dan informatika dilakukan pengunggahan hasil penelitian pada web atau dengan melaksanakan e-jurnal/e-bulletin/e-berkala ilmiah yang dilengkapi dengan counter/penghitung jumlah download hasil penelitian serta dengan melakukan publikasi hasil penelitian melalui seminardan pengikutsertaan hasil penelitian pada pameran.

Pencapaian target dalam kurun waktu 2011—2014 untuk jumlah pemanfaatan karya riset ini ditunjukkan pada Gambar 3.64 di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo	5 dokumen	8 dokumen	160%

Tabel 3.63 Persentase jumlah pemanfaatan karya riset bidang komunikasi dan informatika untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo Tahun 2014

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014		% Capaian 2014
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Prosentase (%) pemanfaatan karya riset	90%	100% (72 edisi telah diterbitkan dari 24 judul penerbitan)	100% (69 edisi telah diterbitkan dari 24 judul penerbitan)	104% (72 edisi telah diterbitkan dari 24 judul penerbitan)	100% (4 dokumen karya riset)	100% (4 dokumen karya riset)	100% (8 dokumen karya riset)	100% (8 dokumen karya riset)	100%

Tabel 3.64 Pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo

Dalam upaya mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta meningkatkan pemanfaatan karya riset bidang komunikasi dan informatika untuk penyusunan kebijakan. Sepanjang tahun 2011—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil menerbitkan dan mempublikasikan 8 dokumen karya riset bidang komunikasi dan informatika, yaitu 5 jurnal ilmiah terakreditasi dan 3 jurnal ilmiah di bidang komunikasi dan informatika. Hasil riset di sepanjang tahun telah dipublikasi melalui seminar penelitian dan penerbitan berbagai media cetak seperti jurnal, majalah, bulletin, dan buku bunga rampai.

Pada tahun 2014, pengukuran pemanfaatan karya riset juga dilakukan dengan melampirkan kuesioner mengenai pemanfaatan karya riset bidang kominfo pada setiap hasil riset yang dibagikan kepada stakeholder. Dalam kuesioner tersebut ditanyakan mengenai apakah hasil penelitian/ kajian/ pengembangan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo bermanfaat bagi satuan kerja dan apakah hasil penelitian/ kajian/ pengembangan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di satuan kerja stakeholders.

Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan karya litbang dilakukan penelusuran kebutuhan dari stakeholders terkait kajian-kajian yang mereka perlukan. Empat metode penelitian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni melalui 1) pro-active analysis, 2) policy-impact analysis, 3) evaluasi kebijakan, dan 4) modelling pengembangan bidang kominfo. Kementerian Kominfo juga mempublikasikan hasil penelitian pada web atau dengan melaksanakan e-jurnal/e-bulletin/e-berkala ilmiah yang dilengkapi dengan counter/penghitung jumlah download hasil penelitian.

Di samping itu, sebagai bentuk kendali mutu Kementerian Kominfo juga mengusulkan sertifikasi lembaga penelitian (unit kerja pelaksana penelitian) dan peningkatan jumlah jurnal/bulletin/berkala ilmiah yang tersertifikasi. Capaian terkait dengan jurnal penelitian yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan. Hingga Desember tahun 2014, Kementerian Kominfo berhasil memperoleh status terakreditasi untuk 5 jurnal penelitian yakni: 1) Jurnal IPTEK-KOM, 2) Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 3) Buletin Pos dan Telekomunikasi, 4) Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kominfo, dan 5) Jurnal Studi Komunikasi dan Media.

Selain itu 2 lembaga penelitian di lingkungan Badan Litbang Kementerian Kominfo yakni Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah memperoleh status terakreditasi sebagai kelembagaan riset dari Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ristek di tahun 2014.

11.3 Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan (IK11.3)

Indikator tentang Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan diukur dari seberapa banyak Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan dibandingkan dengan target Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband.

Seperti terlihat pada Tabel 3.65, target indikator kinerja untuk Tahun 2014 adalah 4 disain, dan diperoleh capaian 100%. Indikator kinerja dimaksud merupakan dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi yang telah dimulai sejak tahun 2007 dengan melibatkan berbagai peneliti dan industri nasional.

Pencapaian target Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan sepanjang tahun 2011—2014 ditunjukkan pada Tabel 3.66.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	4 disain	4 disain	100%

Tabel 3.65 Persentase Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	15 disain	4 disain	8 disain	11 disain	15 disain

Tabel 3.66 Target dan realisasi jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan

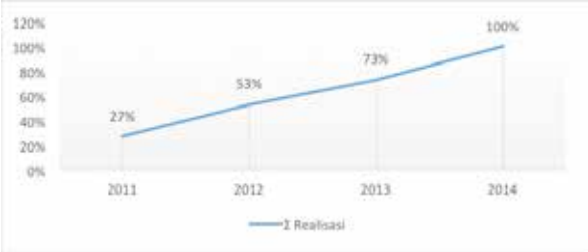

Gambar 3.27 Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan

Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk :

a. menstimulasi riset dibidang telekomunikasi untuk menghasilkan inovasi yang bernilai komersial tinggi,
b. mendorong percepatan dan perluasan komersialisasi produk inovatif dibidang telekomunikasi,
c. memperkuat daya saing teknologi dan industri dalam negeri, dan/atau
d. untuk meningkatkan kandungan lokal pada industri telekomunikasi.

Pada bulan September 2014, telah dilaksanakan penandatanganan kerjasama dengan salah satu pabrikan dari Jerman, yaitu MIMOon yang tertarik untuk menggunakan dan mengembangkan produk Bromo ini. Hal ini membuktikan bahwa hasil rancang/desain prototype BWA hasil Putra Putri Indonesia diakui dan diterima di pasar Internasional, karena Prototype yang dirancang sesuai Standard International.

Perangkat lain yang dihasilkan oleh Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi fase pertama adalah Radio Komunikasi Nelayan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengasilkan prototype perangkat radio nelayan dengan tingkat kandungan local yang tinggi, dengan alokasi frekuensi dan power yang sesuai dengan peruntukannya, serta memiliki harga yang terjangkau.

pada tahun ini telah dilakukan uji lapangan di Ancol dan uji parameter teknis dengan balai Monitoring Jakarta. Pada saat ini perangkat dalam tahap sertifikasi perangkat dan proses neoisasi dengan Pabrikan untuk dilakukan proses mass production.

Pada tahun 2014 ini output kegiatan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi adalah menghasilkan simulasi desain dan rancangan dari judul-judul penelitian yang telah disayembarakan pada tahun 2013. Penelitian-penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Prototipe Perangkat Lunak Penepis Konten Negatif
b. Perancangan Layer Fisik Small Cell LTE Berbasis Software Define Radio (SDR)
c. Rancang Bangun Radio Cuaca untuk Nelayan
d. Pengembangan Active integrated Antenna (AIA) Multiple Input Multiple Output (MIMO)
e. Sistem eHealth Smart Card untuk Data Rekam Medis Elektronik
f. Sistem Antena Reconfigurable Beamsteerable dan Friendly Environment Dengan Struktur Stripmikro Untuk Piranti Komputasi Bergerak LTE-Advanced
g. Perancangan Dan Implementasi Sistem Verifikasi Sidik Jari Pada Perangkat Reader Mandiri ISO/IEC 14443
h. Pengembangan Sistem Monitoring dan RF Sensor

Selanjutnya pada tahun 2015 direncanakan akan dilanjutkan pembuatan prototype dari hasil-hasil simulasi di atas. Dengan pencapaian indikator kinerja tersebut telah mendorong penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi yang melibatkan peneliti dan perguruan tinggi dalam rangka membangun kompetensi teknologi dalam negeri serta mampu memberikan dukungan bagi industri dalam negeri untuk memproduksi perangkat telekomunikasi dengan kandungan lokal yang tinggi.

12. Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (S4.2)

Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang diperlukan dalam pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kementerian Kominfo menyelenggarakan berbagai metode untuk menjamin terciptanya SDM bidang kominfo yang kompeten dan kompetitif baik melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi baik bagi aparatur pemerintah, industri, dan masyarakat, serta tak kalah pentingnya adalah perumusan peraturan terkait standarisasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang kominfo.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU denganmasing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

12.1 Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik (IK12.1)

Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik diukur dari seberapa banyak SDM yang terdidik dan terlatih di bidang kominfo yang dihasilkan dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik	5000 orang	5542 orang	111%

Tabel 3.67 Persentase jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Chief Information Officer (CIO)	18.636 orang	824	1156	1892	2228
Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis Budaya Dokumentasi		875	1164	1812	2112
Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis Komunikasi Publik		255	591	1099	2107
Jumlah Peserta diklat literasi kominfo		3655	6562	11173	15071
Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik		5.609 orang	9.473 orang	15.976 orang	21.518 orang

Tabel 3.68 Target dan realisasi Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik

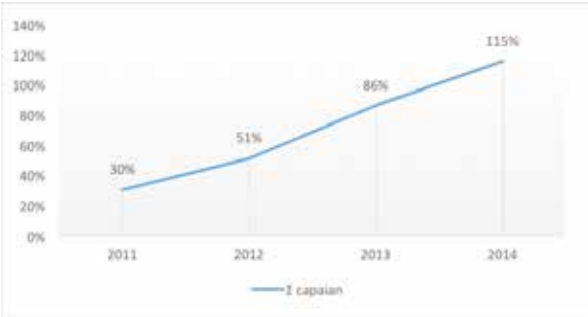

Gambar 3.28 Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik

Seperti terlihat pada tabel di atas, bahwa target per tahun 2014 adalah 5000 orang, dan yang terealisasi adalah sebanyak 5.542 orang atau sama dengan 111%. Pencapaian target indikator Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Seperti terlihat pada tabel di atas, pencapaian jumlah SDM bidang Kominfo yang terdidik dan terlatih sampai dengan tahun 2014 adalah 21.518 orang, yang dicapai dengan melaksanakan 4 jenis indikator, yaitu:

1. Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek CIO
2. Jumlah SDM yang mengikuti Budaya Dokumentasi
3. Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Komunikasi Publik
4. Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo

Bimtek CIO dan Bimtek Budaya Dokumentasi berfokus pada peningkatan kompetensi SDM pemerintahan daerah, khususnya bidang CIO dan kompetensi di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi dengan memanfaatkan TIK. Di lain sisi, pelatihan Komunikasi Publik memfokuskan pada upaya menciptakan masyarakat yang berdaya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya melalui TIK dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, oleh karena itu pelatihan ini diberikan kepada para ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, UMKM serta masyarakat disabilitas karena masyarakat ini agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pada tahun 2014, capaian kinerja untuk Bimtek CIO dan Bimtek Budaya Dokumentasi tidak maksimal dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran oleh pemerintah yang mengakibatkan pembatalan beberapa kegiatan di beberapa lokasi. Salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penyusunan database peserta sebagai calon peserta bimtek tingkat lanjutan, penggunaan transportasi darat (kereta api) di sekitar pulau Jawa untuk mengefisiensikan biaya perjalanan dan penyusunan agenda pelaksanaan kegiatan

selama tahun anggaran yang terinci sehingga target-target dapat tercapai. Namun, secara keseluruhan jumlah target SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik dapat dicapai dengan baik melalui pelatihan literasi kominfo yang dilaksanakan di dua pusat pelatihan TIK yaitu BPPTIK Cikarang dan Pustiknas Ciputat.

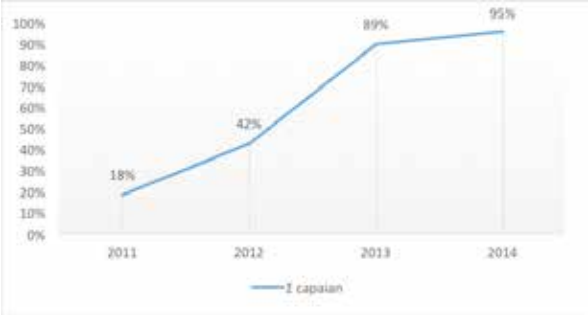

Gambar 3.29 Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik

12.2 Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika (IK12.2)

Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika diukur dari seberapa banyak SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika yang dihasilkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan Renstra 2010—2014.

Sesuai Tabel 3.69, pencapaian kinerja terhadap indikator tersebut terealisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan pada tahun 2014. Indikator tersebut dicapai melalui:

1. penyusunan rancangan regulasi terkait Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang kominfo
2. pendidikan dan pelatihan ahli multimedia.

Indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul di bidang komunikasi dan informatika. Penjelasan pencapaian target indikator prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika dalam kurun waktu tahun 2011—2014 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.70 dan Gambar 3.39 di bawah ini.

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Kominfo merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Kominfo dalam mendorong upaya penciptaan dan peningkatan sumber daya manusia unggul Indonesia di bidang komunikasi dan informatika dimana SKKNI diharapkan dapat menjadi suatu jaminan kualitas dalam pengukuran kualitas SDM Indonesia di bidang kominfo yang terukur dan diakui. Selama periode 2011—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan penyusunan 12 Rancangan SKKNI, dimana 7 diantaranya telah mendapat pengesahan SKKNI dari Menteri Tenaga Kerja. Berbagai kendala dihadapi terutama dalam prosedur dan keterbatasan waktu tim penyusun yang terdiri dari berbagai pihak eksternal terkait bidang profesi kerja yang disusun. Namun hal ini dapat diatasi dengan baik pada tahun 2013 dan 2014 melalui koordinasi dengan seluruh tim penyusun, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehingga target dapat terpenuhi.

Selain melalui SKKNI, upaya meningkatkan SDM unggul bidang kominfo juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan ahli multimedia yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta. STMM memiliki program pendidikan kedinasan dan swadana. Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di STMM selalu memenuhi target dari tahun ke tahun kecuali pada

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	100% (4 dokumen dan 1813 orang peserta diklat)	100% (4 dokumen dan 1828 orang peserta diklat)

Tabel 3.69 Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Target Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Kominfo	16 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen
Jumlah SDM yang pendidikan dan pelatihan ahli multimedia	6.412 orang	1.128 orang	2.681 orang	4.276 orang	6.104 orang

Tabel 3.70 Target dan realisasi Prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

tahun 2013 dengan selisih yang amat kecil. Selain secara kuantitas, peningkatan secara kualitas juga dialami dimana beberapa mahasiswa STMM memperoleh prestasi lainnya seperti memenangkan penghargaan Festival Film Indonesia. Dengan demikian disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk tahun 2014 untuk prosentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika tercapai 100%.

12.3 Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika (IK12.3)

Indikator jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika diukur dari seberapa banyak SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika yang dihasilkan dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

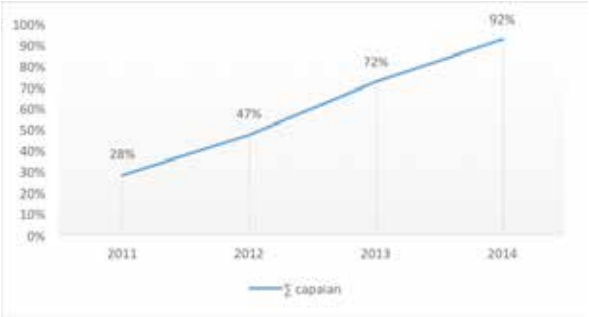

Gambar 3.30 Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika	2000 orang dan 445 orang penerima bea-siswa S2	1428 orang dan 368 orang penerima bea-siswa S2	77%

Tabel 3.71 Capaian jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika

Pencapaian IKU tersebut dilakukan dengan melaksanakan :

1. program pendidikan S2 & S3 Dalam dan Luar Negeri, dan
2. pelatihan dan sertifikasi bidang TIK.

Program Beasiswa S2 dilakukan melalui kerjasama dengan universitas-universitas baik dari dalam maupun luar negeri dengan target peserta adalah PNS dan masyarakat industri. Untuk pencapaian untuk Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika seperti terlihat pada Tabel 3.72 dan Gambar 3.29.

SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika juga dicapai melalui Program beasiswa S2 dan S3 Dalam dan Luar Negeri yang telah dilaksanakan sejak 2007 serta pelatihan dan sertifikasi bidang TIK. Kedua kegiatan tersebut diberikan terbuka kepada aparatur pemerintah maupun masyarakat umum, khususnya angkatan kerja muda yang membutuhkan sarana peningkatan kompetensi bidang TIK.

Selama tahun 2011—2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan beasiswa S2 & S3 kepada 2.400 mahasiswa, dan peserta untuk mengikuti sertifikasi bidang TIK sebanyak 12.421 orang. Untuk pemberian beasiswa masih di bawah target dikarenakan perencanaan dan penetapan kuota beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri yang kurang optimal dengan anggaran yang tersedia serta adanya kuota peserta yang tidak dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam negeri yang telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Beberapa solusi telah ditempuh seperti mengadakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi negeri, mengurangi kuota beasiswa S2 luar negeri dan mengadakan perjanjian khusus dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk mengefisienkan biaya pendidikan. Sedangkan untuk kegiatan

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah SDM yang mengikuti Program S2 & S3 Dalam dan Luar Negeri	2.566 orang	412 orang	856 orang	1.664 orang	2.400 orang
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi bidang TIK	13.331 orang	5.331 orang	7.978 orang	10.625 orang	12.035 orang

Tabel 3.72 Target dan realisasi Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika

pelatihan dan sertifikasi di bidang TIK dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Budaya dokumentasi dan CIO (Chief Information Officer) baik untuk masyarakat umum (angkatan kerja muda) maupun Pegawai Negeri Sipil. Target pada tahun 2014 terkendala beberapa hal, seperti sebagai berikut:

a. Penyesuaian jumlah lokasi kegiatan yang disebabkan kebijakan Penghematan anggaran.
b. Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tingkat lanjutan yang tidak memenuhi target, karena kendala administrasi pada saat penyampaian undangan pelatihan dan sertifikasi tingkat lanjut tidak diterima oleh calon peserta yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tingkat dasar (tidak didisposisikan, mutasi pegawai, aturan kepegawaian instansi setempat).

13. Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan (S4.3)

Industri komunikasi dan informatika saat ini telah menjadikan informasi sebagai modal dasar kemajuan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, perlu terus didorong penciptaan produk-produk, baik berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat. Langkah selanjutnya adalah mendorong agar pelaku industri terutama UKM untuk memanfaatkan produk TIK dalam negeri yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak bangsa. Sebab itu, peningkatan perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM menjadi penting.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU dengan masing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

13.1 Prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK (IK13.1)

IKU prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK diukur dari jumlah sarana dan prasarana yang dibuat untuk mendukung perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK dibandingkan dengan target ditetapkan Perjanjian Kinerja 2014 dan Renstra 2010—2014.

Dari Tabel 3.73, terlihat bahwa pencapaian kinerja terhadap indikator tersebut adalah sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui pembinaan UKM yang memanfaatkan sarana dan prasarana serta aplikasi e-business dan membangun sarana dan prasarana e-business. Pencapaian untuk kurun waktu 2011—2014 adalah pada Tabel 3.74 dan Gambar 3.30.

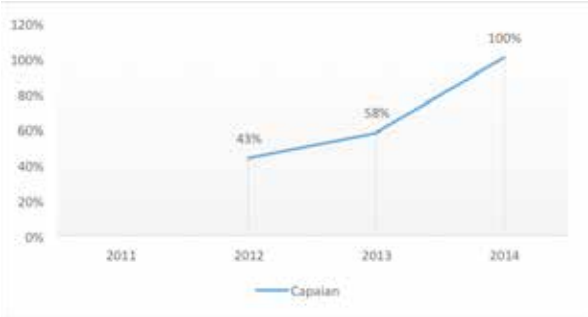

Gambar 3.31 Perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK	100% (300 UKM dan 2 unit pusat layanan e-bussines)	100%	100%

Tabel 3.73 Prosentase perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah UKM yang memanfaatkan sarana dan prasarana serta aplikasi e-business	300	-	150	250	300
Jumlah sarana dan prasarana e-business	8	-	1	2	8

Tabel 3.74 Target dan realisasi perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK

Pencapaian indikator perkembangan industri (manufaktur) penunjang TIK melalui peningkatan sarana dan prasaranadi bidang e-Business yang menyasar kepada pembinaan UKM. Hal ini penting karena prosentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah sekitar 95% dari total perusahaan di dalam negeri dan merupakan tulang punggung dan penggerak ekonomi nasional. UMKM di Indonesia masih sangat minim dalam mendapatkan peluang dalam aktivitas ekonomi global sehinggaUMKM berpotensi untuk kehilangan peluang dalam hal terintegrasi dalam global supply chain (rantai pasok global), tawaran bisnis, dan peningkatan produktivitas dan efisiensi internal UMKM itu sendiri. Kondisi tersebut dikarenakan untuk mendapatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk terlibat dalam jaringan bisnis regional dan global yang membutuhkan tingkat akses dan penggunaan TIK yang tinggi.

Pernyataan UKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa telah memunculkan sebuah konsekuensi bagi pemerintah agar mengupayakan bagaimana perdagangan di era pasar terbuka harus dapat digarap juga oleh para pelaku UKM, baik perdagangan di dunia nyata (real market) dan terlebih lagi perdagangan di dunia maya (cyber market) yang saat ini telah menjadi pasar yang sangat potensial dalam dunia perdagangan. Upaya nyata yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelaku UKM di Indonesia untuk dapat berperan serta aktif dalam perkembangan kemajuan perdagangan tersebut sehingga dapat mengkokohkan keberadaan mereka sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

Untuk mendukung transformasi dari masyarakat UKM ke e-UKM, maka diperlukan suatu Aplikasi Pemetaan e-Business, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kreatifitas dan kemampuan masyarakat/komunitas/organisasi kemasyarakatan/ LSM setempat yang mempunyai minat di bidang TIK, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan demikian diharapkan dapat membantu transformasi dari manual bisnis menjadi elektronik bisnis, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

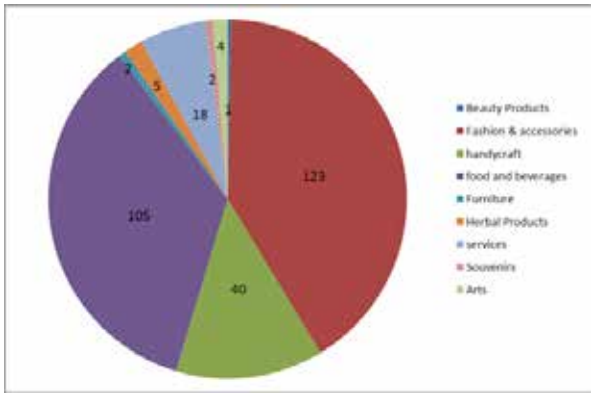

Gambar 3.32 Data UKM yang telah menerapkan aplikasi e-business berdasar bidang usaha Tahun 2014

14. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal (S4.4)

Sebagai negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan ragam kearifan lokal, Indonesia harus memanfaatkan potensi ini untuk mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreativitas dan inovasi, tentunya berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah. Kearifan lokal menjadi penting, karena persoalan komunikasi dan informatika di setiap tempat berbeda-beda. Dengan sentuhan kearifan lokal maka persoalan ini akan bisa diatasi dengan baik.

Untuk mencapai itu, diperlukan dorongan dari pemerintah kepada masyarakat agar melahirkan inovasi dan karya bidang TIK dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Selain dukungan fisik, pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial lewat karya-karya di bidang TIK.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 2 (dua) IKU dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

14.1 Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat (IK14.1)

Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat diukur dari seberapa banyak karya bidang TIK yang dihasilkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/ penetapan kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat	100% (100 karya)	0%

Tabel 3.75 Prosentase jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat Tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa target yang ditetapkan 100% (100 karya). Untuk mencapainya diadakan sosialisasi dan pengumpulan karya cipta bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari seluruh Indonesia. Indikator kinerja ini ditetapkan sejak tahun 2013, dengan target 100 karya dan realisasi 100 karya (100%). Akan tetapi, dengan adanya perubahan kebijakan pimpinan tentang pemotongan anggaran tahun 2014, maka target kinerja ini tidak dapat dilaksanakan

14.2 Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia (IK14.2)

Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia diukur dari seberapa banyak aplikasi/software/ content digital yang dihasilkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase jumlah aplikasi/ software/ content digital Indonesia	100% (700 karya)	144% (1007 karya)

Tabel 3.76 Prosentase jumlah aplikasi/softwawre/content digital Indonesia tahun 2014

Dari Tabel 3.76, terlihat capaian untuk Tahun 2014 adalah sebesar 1007 karya, melebihi target 700 karya. Dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut telah diadakan ajang INAICTA yang merupakan ajang lomba karya cipta bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahunan yang berskala nasional. Untuk capaian target indikator Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia selama kurun waktu 2011—2014 dapat dilihat pada Gambar 3.32 dibawah ini.

Gambar 3.33 Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah aplikasi/software/content digital mengalami peningkatan. Terutama di tahun 2014, terjadi peningkatan karya sebanyak 307 karya, dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dengan hadirnya INAICTA yang dapat memberi peluang bagi karya TIK Indonesia mengambil bagian dalam arena regional dan global. Diselenggarakannya INAICTA didasari oleh kenyataan bahwa kurangnya perhatian dan apresiasi terhadap karya cipta anak bangsa di bidang TIK. Dengan adanya INAICTA diharapkan muncul karya ciptaan anak bangsa yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

15. Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional (S5.1)

Berbagai potensi keunggulan lokal bangsa Indonesia seperti : keindahan alam Indonesia, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas Indonesia tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi semacam National Information Database, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan bangsa.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

15.1 Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi (IK15.1)

Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi diukur dari seberapa banyak inkubator yang terbentuk dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/ penetapan kinerja. Untuk mencapai indikator kinerja ini dilakukan dengan membentuk inkubator bisnis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selama tahun 2014 Inkubator Bandung melakukan pembinaan terhadap lima tenant, sedangkan Inkubator Yogyakarta yang bekerja sama dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta membina 12 tenant. Pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan produk atau aplikasi, yaitu game, animasi, mobile, desktop, dan web.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi Tahun 2014	4 lokasi	0%

Tabel 3.77 Prosentase Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi	4	1	2	2	2

Tabel 3.78 Target dan realisasi Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi

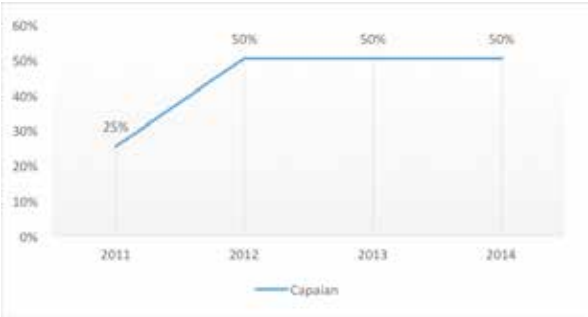

Gambar 3.34 Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasi

Seperti terlihat pada Tabel 3.77 di atas, bahwa pada tahun 2014 tidak ada capaian, karena tidak ada pembentukan inkubator baru. Pencapaian indikator Jumlah Inkubator Industri Informatika yang difasilitasidapat dilihat pada Tabel 3.78 dan Gambar 3.33

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sampai dengan Tahun 2014, seharusnya dibangun 4 inkubator Industri Informatika yang difasilitasi. Pada pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 membangun 1 inkubator, dan di tahun 2012 membangun 1 inkubator baru, sehingga jumlahnya menjadi 2 inkubator. Kedua inkubator tersebut terdiri dari Inkubator Inovasi Telematika Bandung (I2TB) dan Inkubator Inovasi Telematika Yogyakarta (I2TY). Tetapi, Tahun 2013 dan 2014 arah kebijakan berubah, tidak lagi membangun inkubator baru melainkan fokus kepada penguatan 2 (dua) inkubator yang sudah dibangun dan melaksanakan pemberdayaan bagi tenant yang sudah ada agar dapat mandiri dan berprestasi.

Tenant tersebut antara lain PT. Acintya Rupa Karya Nayaga (produk animasi), Metric Design (Mobile Application), Nightspade IT Consulting (produk software), Kojo Anima (animasi), GITS IT Solution (Sistem Aplikasi Informasi), Flashlab (games), Synmedia (Iklan & Brand Identity Service). Adapun hasil penguatan tercantum didalam tabel berikut :

Tahun	I2TB Bandung	I2TY Yogyakarta
2011	7 tenant dan meluluskan 4 tenant yang mandiri	-
2012	6 tenant	11 tenant
2013	Pemberdayaan, training dan Mou dengan PT.Telkom	Pemberdayaan, training dan Mou dengan AMIKOM
2014	6 tenant	12 tenant dengan 4 tenant mandiri dan 1 tenant memperoleh international prize di Barcelona.

Tabel 3.79 Pertumbuhan Tenant Inkubator

Inkubator sejatinya adalah organisasi yang menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang menaikkan nilai tambah suatu usaha. Secara operasional dalam rangka pengembangan wirausaha baru yang mandiri, inkubator memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan yang didukung oleh fasilitas dan akses teknologi, manajemen, pasar, modal, serta informasi secara umum maupun spesifik.

Inkubator Industri Informatika adalah tempat yang dirancang untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) industri kreatif yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tujuan akhirnya menjadikan para pelaku usaha di industri informatika menjadi perusahaan yang menghasilkan keuntungan, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang berkelanjutan hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Program inkubasi umumnya ditujukan kepada startup company atau suatu perusahaan yang masih berada di tahap-tahap awal memulai usaha. Pengembangan industri berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membutuhkan pembinaan yang lebih intensif. Kelompok usaha atau industri ini agak berbeda dengan bidang-bidang lain karena pada umumnya jenis industri ini didirikan oleh personel yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, memerlukan jumlah modal yang besar, mempunyai kandungan teknologi tinggi, serta resiko tinggi dalam pemasarannya.

Pada tahap inkubasi, UMKM binaan (tenant) diberikan pendampingan penuh oleh tim konsultan yang secara intensif melakukan evaluasi dan konsultasi agar mampu menjadi teknopreneur yang tangguh dan mandiri. Lama masa inkubasi umumnya antara satu hingga tiga tahun. Adapun fasilitas yang diberikan selama masa inkubasi dikenal dengan konsep 7S:

1. Space: menyediakan tempat bagi tenant untuk mengembangkan usaha pada tahap awal;
2. Shared: menyediakan fasilitas kantor yang dapat digunakan secara bersama, misalnya ruang rapat, telepon, faksimili, komputer dan internet;
3. Services: menyediakan layanan konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan teknologi;
4. Support: membantu dukungan akses kepada riset, jaringan profesional, teknologi dan investasi;
5. Skill development: memberikan latihan keterampilan teknis, penyiapan rencana bisnis, manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya;
6. Seed Capital: membantu akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada;
7. Synergy: mengadakan kerjasama dengan pihak terkait, seperti universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional, maupun dengan masyarakat lain.

Secara umum, keberadaan Inkubator Industri Informatika telah memberikan berbagai manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi setempat. Secara khusus, inkubator dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti : menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang mendorong meningkatnya pajak pendapatan, meningkatkan citra daerah, baik dari sisi pemerintahan, sosial budaya dan teknologi, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya wirausaha, terutama di bidang informatika, dan memperluas area bisnis, dengan munculnya berbagai perusahaan startup.

15.2 Jumlah Karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional

Jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional diukur dari seberapa banyak karya yang tercipta dan ikut dalam kompetisi internasional seperti APICTA.

Indonesia aktif mengirimkan delegasi ke ajang kompetisi TIK internasional yakni ASEAN ICT Award (AICTA) dan Asia Pacific ICT Awards (APICTA). APICTA merupakan ajang lomba kreatifitas dan inovasi piranti lunak tahunan yang diikuti oleh perorangan atau perusahaan bidang TIK di kawasan Asia Pasifik. Delegasi berasal dari jawara dalam Indonesia ICTA Award (INAICTA), dimana selanjutnya mereka harus mengikuti bootcamp untuk mengambil karya-karya yang layak dan seusia dengan kriteria dalam AICTA dan APICTA. Target jumlah karya delegasi Indonesia pada ajang APICTA 2014 ini adalah 10 karya, ternyata terealisasi sebanyak 26 karya.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi Internasional	10 karya	26 karya	260%

Tabel 3.80 Prosentase jumlah karya TIK Indonesia yang ikut dalam kompetisi internasional Tahun 2014

Sementara keuntungan yang diharapkan dengan mengikuti lomba kreasi dan karya cipta piranti lunak APICTA antara lain :

1) Meningkatnya semangat inovasi dan kreatifitas di bidang pengembangan piranti lunak oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya di Indonesia.
2) Mendapatkan kesempatan untuk melakukan benchmark terhadap inovasi produk piranti lunak Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dari Indonesia terhadap inovasi produk-produk yang dihasilkan oleh negara anggota APICTA guna mendapatkan Produk Unggulan Nasional Indonesia.
3) Mendapatkan kesempatan untuk menjajaki aliansi bisnis diantara peserta lomba APICTA Award maupun dari perusahaan penyedia solusi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi yang sudah ada.
4) Kemungkinan mendapatkan investor strategis atau modal ventura.
5) Kemungkinan mendapatkan calon pembeli dari perusahaan-perusahaan negara anggota APICTA.
6) Menjadi bagian dari komunitas dan resources pool para knowledge worker di kawasan Asia Pasifik di industri Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.
7) Membantu usaha pemerintah negara anggota APICTA untuk mempersempit Digital Divide dengan melakukan kerja sama antar negara anggota APICTA.

Tahun	Lokasi	Prestasi Indonesia
2009	Melbourne, Australia	4 Merit
2010	Kuala Lumpur, Malaysia	• Indonesia memecahkan rekor dalam sejarah 10 tahun penyelenggaraan APICTA dengan mengirimkan peserta termuda • 1 Winner
2011	Pattaya Thailand	1 Winner, 3 Merit
2012	Brunei Darussalam	2 Winner dan 5 Merit
2013	Hongkong	1 Winner dan 4 Merit
2014	Jakarta	8 Merit

Tabel 3.81 Prestasi Indonesia pada APICTA Tahun 2009—2014

Gambar 3.35 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara APICTA pada tahun 2014

16. Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika (S5.2)

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika yang begitu pesat menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan. Dengan populasi yang besar di tambah ekonomi yang terus tumbuh, produk dalam negeri bidang bidang komunikasi dan informatika harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Salah satunya dilakukan dengan pencapaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006. TKDN Suatu batasan atau nilai yang merepresentasikan berapa tingkat kandungan lokal dalam negeri dalam suatu produk barang/jasa.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dan masing-masing pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

16.1 Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006 (IK16.1)

Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006 diukur dari tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang digunakan oleh penyelenggara seluler 3G dibandingkan dengan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/ penetapan kinerja.

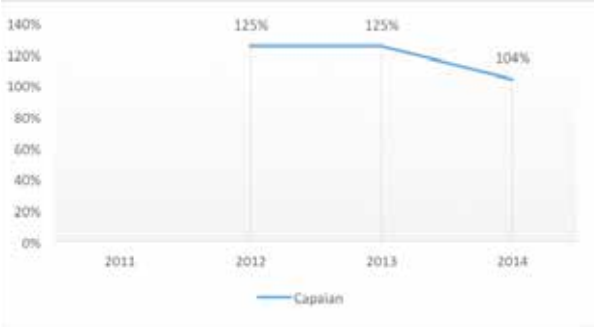

Gambar 3.36 TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7/2006

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006	80%	83.3%	104%

Tabel 3.82 Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7/2006 Tahun 2014

Seperti terlihat pada tabel di atas, target pada tahun 2014 adalah 80% dengan realisasi 83,3%, atau melebihi target seharusnya atau tingkat capaian 104%. Indikator tersebut dicapai dengan melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggara Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operational (Operational Expenditure/ Opex) pada Penyelenggara Telekomunikasi.

Gambaran pencapaian target sepanjang tahun 2011—2019 untuk indikator prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006 ditunjukkan pada Tabel 3.83 dan Gambar 3.35 di bawah ini.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2014 target kinerja yang ditetapkan telah dicapai. Dengan melaksanakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika seperti yang telah disebutkan di atas utamanya terhadap klausul bahwa TKDN capex pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G sebesar minimal 30 %, sedangkan TKDN Opex adalah sebesar minimal 50% pada penyelenggara jasa telekomunikasi seluler berbasis 3G bertujuan untuk:

1) Mendorong penggunaan produk dalam negeri secara maksimal;
2) Memacu industri telekomunikasi untuk selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri;
3) Mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi;
4) Memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja;

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Prosentase pencapaian TKDN penyelenggara seluler 3G sesuai dengan Permen Kominfo No. 7 Tahun 2006	-	-	80% penyelenggara seluler memenuhi TKDN CAPEX ≥ 30% dan OPEX ≥ 50%	100% penyelenggara seluler memenuhi TKDN Capex ≥32,34% dan Opex ≥75,40%	80% penyelenggara seluler memenuhi TKDN CAPEX ≥30% dan TKDN OPEX ≥50%	100% penyelenggara seluler memenuhi TKDN CAPEX ≥34,67% dan TKDN OPEX ≥77,90%	80% dari akumulasi keseluruhan parameter	83,33% dari akumulasi keseluruhan parameter

Tabel 3.83 Target dan realisasi Pencapaian TKDN Penyelenggara Seluler 3G sesuai Permenkominfo No.7/2006

5) Membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat tertentu, dan;
6) Membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri.

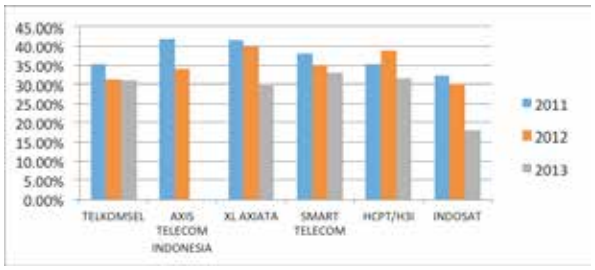

Gambar 3.37 TKDN Capex Tahun Buku 2011 – 2013

Gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013, prosentase TKDN Capex seluruh operator mengalami tren penurunan sampai hampir mendekati ambang batas minimal sebesar 30%.
Gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun

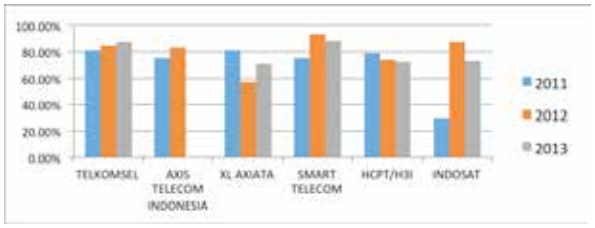

Gambar 3.38 TKDN Opex Tahun Buku 2011 - 2013

2011 sampai 2013, prosentase TKDN Opex seluruh operator mengalami fluktuasi, tetapi masih jauh di atas ambang batas minimal sebesar 50%, kecuali TKDN Opex Indosat Tahun Buku 2011yang hanya mencapai 30%.

17. Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika (S5.3)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 1 (satu) IKU dan dijabarkan ke dalam sub-sub IKU denganmasing-masing pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut:

17.1 Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi

Prosentase kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi diukur dari jumlah kerjasama yang terjalin dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

Dari ukuran tersebut tercapai realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan di tahun 2014. IKU tersebut dapat dicapai dengan melakukan:
1. peningkatan nota kesepahaman (MoU)/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dari hasil kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika dan
2. rumusan kerjasama yang dibuat dengan negara sahabat dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika.

Pencapaian target untuk indikator ini dapat terlihat pada Gambar 3.40 di bawah ini, sedangkan jumlah penyelesaian per indikator dapat terlihat pada Tabel 3.85 dan Gambar 3.38.

Seluruh target kinerja tahun 2014 telah tercapai 100%. Bahkan untuk peningkatan nota kesepahaman (MoU)/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dari hasil kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika, realisasinya melampuai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut merupakan hasil representasi dari pencapaian kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika yang berupa nota kesepahaman (MoU)/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dan rumusan kerjasama. Diharapkan dengan tercapainya kesepahaman/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dan rumusan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi	100%	100%

Tabel 3.84 Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi Tahun 2014

Indikator Kinerja	∑ Target 2011—2014	∑ Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana (2011—2014)			
		2011	2012	2013	2014
Target dan realisasi prosentase (%) peningkatan nota kesepahaman (MoU)/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dari hasil kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika	20 Mou	-	5	15	20
Gambar target dan realisasi Jumlah rumusan kerjasama dengan negara sahabat dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika	23 rumusan kerjasama	-	4	11	23

Tabel 3.85 Target dan realisasi Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing

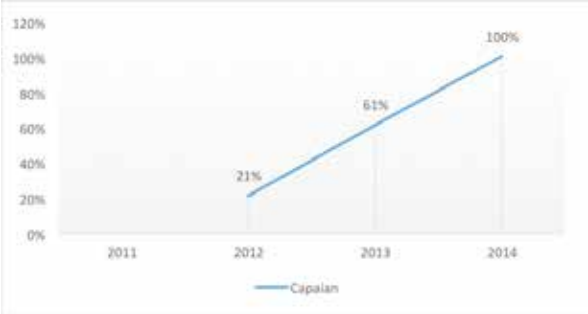

Gambar 3.39 Prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatkan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi

Seluruh target kinerja tahun 2014 telah tercapai 100%. Bahkan untuk peningkatan nota kesepahaman (MoU)/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dari hasil kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika, realisasinya melampuai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian IKU tersebut merupakan hasil representasi dari pencapaian kerjasama Indonesia dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang komunikasi dan informatika yang berupa nota kesepahaman (MoU)/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dan rumusan kerjasama. Diharapkan dengan tercapainya kesepahaman/ agreement/ letter of intent/ agreed minute dan rumusan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika.

18. Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional (S5.4)

Informasi berada pada garda depan dalam pertempuran kompetisi mendahului aset-aset yang lain. Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari mana informasi tersebut dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan ini dapat digunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk, organisasi, bahkan negara. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan menambah nilai modal alam dan modal sosial/negara yang dimiliki Indonesia dengan mencangkokkan modal pengetahuan ke dalam produk atau jasa yang kita hasilkan dan tawarkan sehingga bisa bernilai tinggi dan berdaya saing. Sejalan dengan perkembangan teknologi, peran komunikasi menjadi semakin dominan tidak hanya mencerdaskan publik, tetapi juga membentuk opini dan citra Indonesia di dunia. Oleh karena itu, upaya untuk membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional terus dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasikan 2 (dua) IKU dan masing-masing pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

18.1 Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia / posisi Indonesia dalam fora internasional (IK18.1)

Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia / posisi Indonesia dalam fora internasional diukur dari seberapa banyak rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam sidang internasional yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesiadibandingkan dengan target yang direncanakan dalam Renstra 2010—2014.

Penjelasan pencapaian target indikator prosentase Kerjasama yang dijalin dengan investor asing dalam rangka meningkatan investasi di bidang Informasi dan Komunikasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Prosentase (%) kerjasama yang dijalin dengan negara lain dan organisasi internasional di bidang informasi dan komunikasi	100 %	100 %

Tabel. 3.86 Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia/posisi Indonesia dalam fora Internasional Tahun 2014

Dari tabel diatas tercapai realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan. IKU tersebut dicapai dengan memberikan usulan/ rekomendasi Indonesia pada sidang-sidang internasional terutama terkait teknologi, informasi dan komunikasi.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 usulan/ rekomendasi Indonesia pada sidang-sidang Internasional yang pada posisi ini diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa usulan/ rekomendasi tentang perdagangan jasa telekomunikasi / ICT, penggunaan dan pemanfaatan teknologi di bidang ICT, serta penyelenggaraan pos khususnya yang terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah tercapai sesuai target yang dipatok. Capaian ini mengulangi sukses capaian 100 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

pencitraan positif tentang Indonesia pada Negara-negara yang menjadi target diseminasi.

Penjelasan pencapaian target indikator jumlah bahan informasi Internasional tentang Indonesia kepada masyarakat asing di Indonesia dan masyarakat Indonesia di luar negeri ditunjukkan pada Tabel 3.86 dibawah ini.

Dari tabel tersebut, terlihat pencapaian kinerja terpenuhi 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini meliputi terselenggaranya 47 kegiatan untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri. Aktivitas komunikasi publik merupakan bentuk diseminasi Informasi/ Pencitraan Positif Indonesia kepada Masyarakat Asing dan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Diseminasi/ pencitraan positif tentang Indonesia dilakukan dalam

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia / posisi Indonesia dalam fora internasional	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.87 Prosentase terakomodirnya kepentingan Indonesia/posisi Indonesia dalam fora Internasional dari tahun 2011—2014

Jika dilihat dari tabel 3.87 capaian kinerja dari tahun ke tahun, selalu memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam mengakomodir kepentingan Indonesia / posisi Indonesia dalam forum rapat internasional sehingga dapat membangun citra positif negara Indonesia di mata Internasional.

18.2 Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri

Indikator kinerja jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri diukur dari seberapa banyak aktivitas komunikasi publik dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian/ penetapan kinerja.

Dari ukuran tersebut tercapai realisasi sebesar 100% dari target 100% yang ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dicapai melalui komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri serta dengan melakukan diseminasi informasi/

acara tentang Indonesia dan melalui acara forum dialog. Dengan melakukan diseminasi/ pencitraan positif tentang Indonesia diharapkan citra positif Negara Indonesia di mata Internasional yang telah terbangun dapat lebih kuat lagi.

Untuk melihat kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan aktivitas komunikasi publik dari tahun ke tahun dapat terlihat dari Tabel 3.89 dimana terjadi peningkatan hasil dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya keras untuk melakukan aktivitas informasi kepada masyarakat asing di Indonesia dan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Indikator Kinerja	Target	Capaian
Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri	47 Kegiatan	100 %

Tabel 3.88 Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri Tahun 2014

Indikator Kinerja	2011		2012		2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri	5 paket	5 paket	25 judul bahan informasi	25 judul bahan informasi	48 kegiatan	41 kegiatan	47 kegiatan	47 kegiatan

Tabel 3.89 Jumlah aktivitas komunikasi publik untuk masyarakat asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri

B. Kinerja Lainnya

Selain dari 18 (delapan belas) Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan capaian sebagaimana diuraikan pada butir A dan B di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mencapai beberapa kinerja yang merupakan kinerja yang bersifat adhoc dan terkait dengan tugas fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Regulasi

a. Hingga akhir Desember 2014 terdapat 42 (empat puluh dua) regulasi yang telah ditetapkan yaitu:

No.	NAMA	TENTANG
1.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Perangkat Troposcatter
2.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2014	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Kartu Cerdas Kontak (Contact Smart Card)
3.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Pada Alat dan Perangkat Penerima Siaran Televisi Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation
4.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2014	Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran Amplitudo Modulation (AM) pada Medium Frequency (MF) Pita Frekuensi Radio 535 kHz – 1605,5 kHz
5.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Perangkat Integrated Receiver/ Decoder
6.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Perangkat Router
7.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Perangkat Encoder Internet Protocol Television
8.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protocol pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
9.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2014	Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial– Second Generation
10.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
11.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2014	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda terhadap Penyelenggara Telekomunikasi

No.	NAMA	TENTANG
12.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2014	Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika
13.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2014	Kebijakan Roadmap Penerapan IPv6 di Indonesia
14.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2014	Kampanye Pemilihan Umum Melalui Penggunaan Jasa Telekomunikasi
15.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 15 Tahun 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:_11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV);
16.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2014	Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014
17.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2014	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
18.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 18 Tahun 2014	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi
19.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014	Penangan Situs Internet Bermuatan Negatif
20.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2014	Pedoman Evaluasi Program Penyediaan Akses dan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
21	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2014	Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit
22.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22 Tahun 2014	Penggunaan Pita Frekeunsi Radio 2.3 GHz Penyelenggara Telekomunikasi Bergerak Seluler Pita Frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan Realokasi Personal Communication System 1900 MHz ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

No.	NAMA	TENTANG
23.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2014	Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Komunikasi dan Informatika
24.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 24 Tahun 2014	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal
25.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25 Tahun 2014	Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
26.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial
27.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
28.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2014	Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
29.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2014	Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media
30.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30 Tahun 2014	Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
31.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 31 Tahun 2014	Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita Ultra High Frequency
32.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 32 Tahun 2014	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

No.	NAMA	TENTANG
33.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33 Tahun 2014	Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014
34.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34 Tahun 2014	Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit
35.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35 Tahun 2014	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
36.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014	Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
37.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 37 Tahun 2014	Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
38.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38 Tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
39	Peraturan Bersama Menteri Kominfo dan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2014 dan 31 Tahun 2014	Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
40.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 40 Tahun 2014	Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
41.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2014	Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika
42.	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 42 Tahun 2014	Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.90 Regulasi yang telah ditetapkan

2. Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tahun 2014

a. Komisi Penyiaran Indonesia selama Tahun 2014 menerima 567 proposal Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Lembaga Penyiaran Radio dan Lembaga Penyiaran Televisi.

Dengan demikian maka tindak lanjut pelayanan proses perizinan penyiaran sesuai kewenangan KPI capaiannya adalah 100%.

b. Selama Tahun 2014, Komisi Penyiaran Indonesia menerima 17.691 pengaduan isi siaran dari masyarakat yang bersumber dari 14.919 email, 2.663 sms, dan 109 telepon.

Jumlah	Lembaga Penyiaran Radio			Lembaga Penyiaran Televisi					TOTAL
	LPP	LPS	LPK	LPP	LPS	LPK	DIGITAL	LPB	
	17	205	20	2	168	16	54	85	567

Tabel 3.91 Daftar Proposal Lembaga Penyiaran

Dari 567 proposal Izin Penyelenggaraan Penyiaran tersebut seluruhnya diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk selanjutnya muncul 567rekomendasi kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dari 17.691 pengaduan tersebut, semua pengaduan ditinjaklanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga capaian pengaduan masalah konten siaran yang terselesaikan mencapai 100%.

No.	Sumber Pengaduan	Jumlah
1.	Email	14.919
2.	Sms	2,663
3.	Telepon	109
	Total	17.691

Tabel 3.92 Daftar Pengaduan Isi Siaran

c. Kinerja Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2014

Jumlah permohonan dan pengaduan penyelesaian sengketa informasi publik sampai dengan akhir tahun 2014 mencapai 2.549 kasus dan yang dapat diselesaikan mencapai 734 kasus (28,79). Apabila dikonversi dengan target sebesar 90% maka target capaian indikator kinerja menjadi 31,98%.

Secara empiris kendala yang dihadapi dalam mengefektifkan penyelesaian sengketa adalah:

1. Ketidaksiapan Badan Publik dalam membenahi dan menata sistem layanan informasi publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan permohonan informasi (masyarakat) dan kemudian mengajukan permohonan/pengaduan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat. Hal ini mengakibatkan jumlah permohonan/ pengaduan penyelesaian sengketa terus meningkat secara signifikan.
2. Proses penyelesaian 1 (satu) sengketa bisa mengalami beberapa kali persidangan sehingga membutuhkan waktu yang panjang.
3. Proses persidangan penyelesaian sengketa melibatkan 4 Komisioner sebagai Majelis sehingga tidak memungkinkan menggelar 2 (dua) persidangan secara paralel oleh 7 (tujuh) Komisioner yang ada.
4. Belum diperkenalkannya Pendelegasian Wewenang kepada Komisi Informasi Provinsi dalam proses penyelesaian sengketa yang berlokasi di luar Jakarta sehingga menyita waktu Komisioner.

d. Kinerja Dewan Pers tahun 2014

Sampai dengan akhir tahun 2014 prosentase pengaduan bidang Pers yang terselesaikan adalah sebanyak 523 kasus (94%) dari total kasus yang ditangani oleh Dewan Pers yang berjumlah 555 kasus, sisanya 32 kasus akan diselesaikan di tahun 2015.

Adapun bentuk penyelesaian dari 523 kasus tersebut yaitu 30 kasus dengan cara mediasi (25 kasus dimediasi di Jakarta, 5 kasus di daerah), 281 kasus melalui surat-menyurat, 28 kasus diselesaikan dengan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), 184 kasus melalui komunikasi langsung dengan pihak terkait dan lain-lain. PPR dikeluarkan oleh Dewan Pers apabila proses penyelesaian kasus tersebut tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi.

Hasil mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan Pers adalah keputusan atau rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalis dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk jurnalis atau redaktur yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dari jumlah itu, 95 persen dari putusan Dewan Pers ditaati oleh media atau jurnalis bersangkutan.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2014 adalah sebesar Rp 2.120.043.107.303 atau 57.88% dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp 3.662.955.330.- Secara umum, realisasi anggaran per program Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tampak pada Tabel 3.53 di bawah ini.

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen-kominfo	374.084.001.000	309.279.388.565	82.68%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasara-na Aparatur Kemenkominfo	8.000.000.000	7.935.272.056	99,19%
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkominfo	26.227.477.000	22.924.100.010	87,40%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	184.782.698.000	165.672.653.673	89.66%
5	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	703.744.609.000	637.959.028.554	90.65%
6	Program Penyelenggaraan Pos dan Infor-matika	2.052.482.316.000	695.621.027.667	33.89%
7	Program Pengembangan Aplikasi Infor-matika	151.983.609.000	126.838.414.080	83.46%
8	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	161.650.620.000	153.813.222.698	95.15%
	TOTAL	3.662.955.330	2.120.043.107.303	57.88%

Tabel 3.93 Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2014

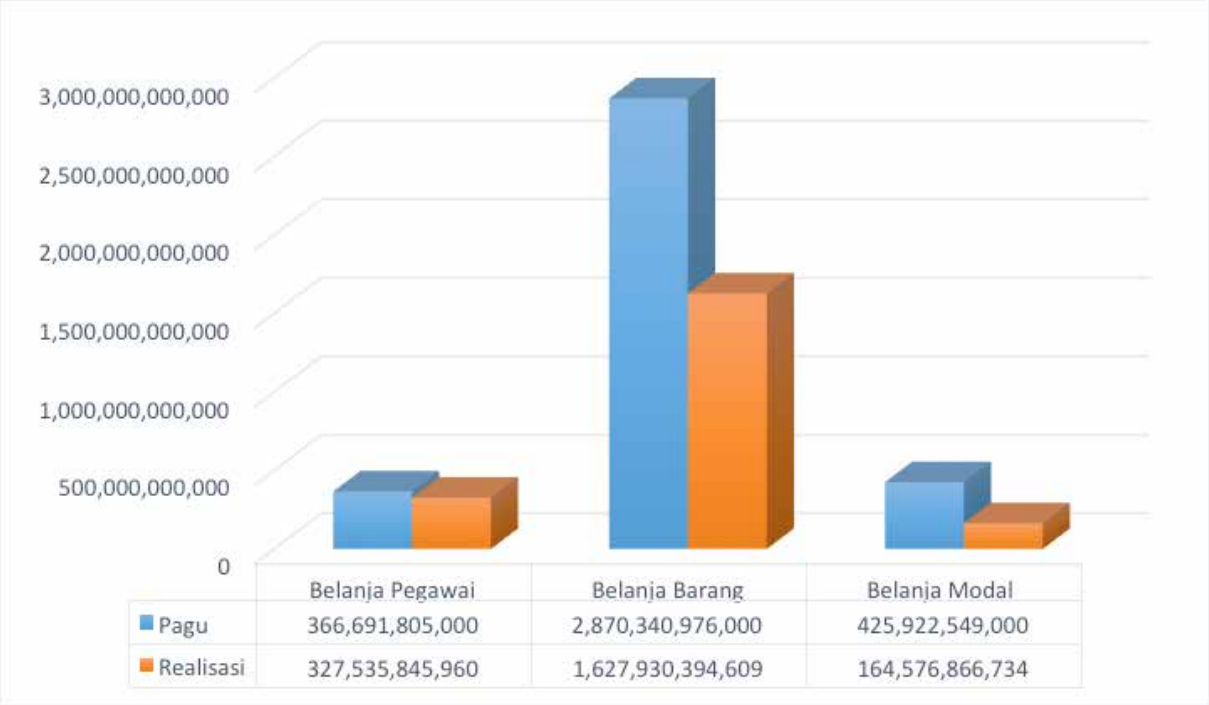

Gambar 3.40 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Penyebab tidak tercapainya target penyerapan anggaran antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih ada pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan BP3TI yang belum dilaksanakan lelangnya karena blokir anggaran, sehingga tidak dapat melakukan kontrak sampai dengan akhir tahun anggaran 2014;
2. Pelaksanaan program "Palapa Ring" di Satker BP3TI ditunda terkait Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 tentang Mencegah Kebijakan yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi. (Terkait Pemilihan Presiden);
3. Adanya keterlambatan dalam proses pengajuan revisi sehingga terdapat Output cadangan sebesar Rp202.800.952.000,- di BLU BP3TI yang tetap tidak bisa dipergunakan.
4. Terkait Blokir Anggaran di BP3TI Tahun 2014, disebabkan karena pelaksanaan Program PLIK/MPLIK sebesar Rp 529.257.196.000,- harus dilakukan evaluasi sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR RI;
5. Pembayaran kepada pihak ketiga pada Satker BP3TI antara lain harus menunggu keputusan pengadilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Anggaran PHLN Tahun 2014 Multiyears sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar), untuk anggaran persiapan Proyek ITTS (Improvement on Television Transmitting Stations) dalam rangka peningkatan Stasiun Pemancar TVRI yang didanai melalui pinjaman lunak dari Pemerintah Spanyol;
6. Anggaran tidak dapat terserap karena Dokumen Kontraknya baru ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 3 Desember 2014 dan Registrasi Kontrak pada tanggal 20 Desember 2014;
7. Adanya sharing anggaran melalui self blocking yang ditujukan untuk efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, sehingga membutuhkan waktu untuk revisi anggaran yang menyebabkan kegiatan menjadi tertunda dan tidak dapat dilaksanakan; dan
8. Adanya pemblokiran anggaran pada Komisi Penyiaran Indonesia senilai Rp 32.000.000.000,- (terkait dengan anggaran sosialisasi pemilu dan pengadaan alat monitoring dan isi siaran di 18 KPID).

4 Penutup

Penutup

A. Kesimpulan

Secara garis besar Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi, dan misi yang diembannya dalam mencapai sasaran strategis tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam perspektif prospek internal, sasaran strategis perspektif layanan, serta sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan berhasil dicapai Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai rata-rata capaian sebesar 104%. Nilai itu menunjukkan keberhasilan yang dicapai, tetapi ada beberapa indikator kinerja utama yang belum memperoleh capaian maksimal karena ada kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan data yang masih berupa data kualitatif;
2. sasaran strategis perspektif layanan tidak berhasil dicapai, karena nilai rata-rata capaian hanya sebesar 94%. Hal itu disebabkan tidak semua sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dan terdapat beberapa capaian yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nilai itu tidak menggambarkan sepenuhnya keadaan layanan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat karena masih terdapat ukuran lain yang harus dipertimbangkan sehingga kondisi layanan sesungguhnya dapat terukur;
3. sasaran strategis perspektif proses internal tidak berhasil dicapai, hanya memperolah nilai rata-rata capaian sebesar 92%. Tidak semua capaian sasaran sesuai dengan target meskipun terdapat beberapa sasaran yang hasilnya sudah optimal;
4. belum semua sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
5. pencapaian sasaran strategis dari perspektif proses internal melebihi target yang ditetapkan, belum sepenuhnya mampu mendukung ketercapaian sasaran perspektif pemangku kepentingan ataupun perspektif layanan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai penetapan sasaran strategis pada perspektif proses internal sehingga secara simultan pencapaian sasaran perspektif proses internal mampu mendukung pencapaian sasaran perspektif pemangku kepentingan dan perspektif layanan; dan
6. dari perspektif pemangku kepentingan, pencapaian setiap indikator pada setiap sasaran strategis belum semuanya dapat diukur hasil/dampak dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun masalah. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemenuhan target kinerja tahun 2014, antara lain, sebagai berikut:

1. terlalu banyak ketidakpastian eksternal, seperti pemotongan anggaran, sehingga banyak dilakukan penyesuaian (revisi);
2. masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis;
3. belum dilengkapinya penetapan indikator sasaran strategis dengan ketersediaan sumber data kuantitatif sehingga menyebabkan tidak terukurnya indikator tersebut;
4. terlalu tingginya indikator penetapan target sasaran strategis perspektif pemangku kepentingan, sementara itu anggaran cenderung di bawah garis batas;
5. sangat bergantungnya ketercapaian sasaran strategis pemangku kepentingan dari dukungan institusi/lembaga terkait sehingga pelaksanaan tupoksi Kementerian Komunikasi dan Informatika belum cukup untuk merealisasikan capaian sasaran tersebut sesuai dengan atau bahkan melebihi target. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang lebih intensif dengan institusi/lembaga berkaitan lainnya.

C. Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2014 dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal berikut.

1. Dalam menyusun anggaran dan rencana kinerja, diperlukan analisa yang matang dalam menerjemahkan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015--2019 ke dalam penganggaran program/kegiatan unit kerja untuk periode selanjutnya.
2. Perlunya penentuan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih menggambarkan ukuran kinerja yang dapat dicapai dengan dukungan anggaran yang ada dan menggambarkan hasil/dampak.
3. Revisi target kinerja dan penganggaran program/kegiatan hendaknya disesuaikan dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

4. Perlu dilakukan pembakuan ukuran penganggaran program/kegiatan terutama antara rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
5. Lebih meningkatkan konsistensi pelaksanaan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Perlu peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih intensif melalui pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan pegawai negeri sipil (PNS).

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga dapat memberikan balikan guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan cara selalu menyesuaikan indikator kinerja yang ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dengan mengembangkan tuntutan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan layanan yang profesional.

KEMKOMINFO